

**STRATEGI PERLAWANAN PETANI
(STUDI KASUS ATAS PERJUANGAN PAGUYUBAN PETANI LAHAN
PANTAI (PPLP) DALAM KONFLIK SENGKETA LAHAN DI PESISIR
SELATAN KULON PROGO YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1**

Oleh:

Fuat Hasan

NIM. 11250075

Pembimbing:

Dr. H. Waryono, M.Ag.

NIP: 197010101999031002

**PROGRAM STUDI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2016



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DD/PP.00.9/041/2016

Tugas Akhir dengan judul : STRATEGI PERLAWANAN PETANI (STUDI KASUS ATAS PERJUANGAN PAGUYUBAN PETANI LAHAN PANTAI (PPLP) DALAM KONFLIK SENGKETA LAHAN DI PESISIR SELATAN KULON PROGO YOGYAKARTA)

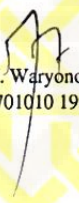
yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FUAT HASAN
Nomor Induk Mahasiswa : 11250100
Telah diujikan pada : Selasa, 26 Januari 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

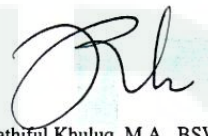
dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

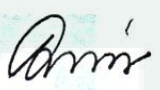
Ketua Sidang/Penguji I


Dr. H. Waryono, M.Ag.
NIP. 19701010 199903 1 002

Penguji II


Lathiful Khuluq, M.A., BSW., Ph.D.
NIP. 19680610 199203 1 003

Penguji III


Dr. H. Zainudin, M.Ag.
NIP. 19660827 199903 1 001

Yogyakarta, 26 Januari 2016
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
DEKAN


Dr. Nurjannah, M.Si.
NIP. 19600310 198703 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856
Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : FUAT HASAN
NIM : 11250100
Judul Skripsi : Strategi Perlawanan Petani (Studi Kasus Atas Perjuangan Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) dalam Konflik Sengketa Lahan di Pesisir Selatan Kulon Progo Yogyakarta)

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam bidang Ilmu Kesejahteraan Sosial.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

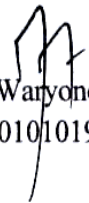
Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 13 Januari 2016

Mengetahui:
Ketua Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial

Pembimbing


Arif Maftuhin, M.Ag., MAIS.
NIP: 197402022001121002


Dr. H. Waryono, M.Ag.
NIP: 197010101999031002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fuat Hasan
NIM : 11250100
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Strategi Perlawanan Petani (Studi Kasus Atas Perjuangan Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) dalam Konflik Sengketa Lahan di Pesisir Selatan Kulon Progo Yogyakarta)”** adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggungjawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 13 Januari 2016

Yang menyatakan,



Fuat Hasan
NIM. 11250100

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk Resa Karimah (Echa), juga keponakan saya Muafiq Khoili Zaka yang sebentar lagi akan naik ke tingkat Sekolah Dasar, Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Rhetor, sahabat-sahabat saya dan kepada para petani di seluruh pelosok negeri...

MOTTO

Penyair-penyair itu, diikuti oleh orang-orang yang dungu. Tidakkah kau lihat, mereka menenggelamkan diri dalam sembarang lembah khayalan dan kata? Dan mereka suka mengujarkan apa yang tidak mereka kerjakan, kecuali mereka yang beriman, beramal baik, banyak mengingat dan menyebut Allah dan melakukan pembelaan ketika dilalimi.

(QS. Asy-syu'araa, 224-227)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah penulis haturkan, karena pada saat ini Allah SWT, masih membukakan pintu hidayah, pintu rahmat, kesehatan, keselamatan, rezeki, serta pintu ilmu kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dan mudah-mudahan Allah juga membukakan pintu surganya. Sholawat beserta salam tidak lupa peneliti hanturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang syafaatnya selalu diharapkan di akhirat kelak. Amin.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Judul skripsi yang penulis ajukan adalah “STRATEGI PERLAWANAN PETANI (*STUDI KASUS ATAS PERJUANGAN PAGUYUBAN PETANI LAHAN PANTAI (PPLP) DALAM KONFLIK SENGKETA LAHAN DI PESISIR SELATAN KULON PROGO YOGYAKARTA*)”.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terimakasih kepada :

1. Orang tua dan keluargaku yang terkasih, bapak Zahroddin, Ibu Suswati dan segenap keluarga yang telah memberikan kasih sayang, doa dan motivasi agar segera menyelesaikan skripsi baik secara moril maupun finansial.
2. Bapak Wariyono M.Ag., selaku pembimbing skripsi saya, yang mana telah banyak meluangkan waktunya dan pemikirannya dalam membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta semua Dosen Ilmu Kesejahteraan Sosial (IKS) Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah banyak memberikan ilmu-ilmu

pengetahuan kepada penulis, terima kasih atas semua jasa Bapak dan Ibu Dosen.

3. Bapak Tri Haryono, Ibu Andayani dan Ibu Abidah Muflihati yang telah meminjami saya buku untuk dijadikan sebagai bahan referensi dalam kepenulisan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Nurjannah, M.Si. selaku Dekan Fakultas Dakwan Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang mana telah memberi ijin untuk melakukan penelitian skripsi ini.
5. Bapak Arif Maftuhin, M.Ag. selaku ketua program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial (IKS) Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan izin dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh pengurus Tata Usaha (TU) dan staff Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi, terutama Bapak Sudarmawan yang telah membantu dan memperlancar dalam proses penyusunan skripsi.
7. Teman–teman program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial yang senantiasa mengkritik, mengingatkan dan memberikan dorongan. Khususnya, kepada Bebek (Darmanto), M. Erwin Diyanto, Tri Jatmiko, Afiful Anam, Salim (Fadhilah Purdananto), M. Romadhon Sulkan, M. Galuh K. P, Akbar serta semua teman-teman IKS angkatan 2011. Selain itu, juga kepada sahabat-sahabat saya di Yogyakarta, khususnya M. Fakhransyah, Wahyu Cahyadi, Johan Saputro, Deni Ardjuna, M. Khafidin, M. Ervin Mujiono, Bangkit

Nugroho dan Kakak sepupu saya M. Thoriq Tri Prabowo, terimakasih saya haturkan atas uang-uang yang sering kalian pinjamkan. Oleh karenanya, saya bisa bertahan hingga sampai sembilan semester dan juga dapat menyelesaikan Skripsi saya ini.

8. Terimakasih yang sebesar-besarnya saya haturkan kepada teman-teman di Kontrakan Aceh, Kontrakan Mandala dan Kontrakan Lampung, yang sudah memberikan tumpangan tempat tinggal selama hampir satu setengah tahun ini, sehingga saya bisa mengerjakan skripsi saya dengan lancar.
9. Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Rhetor dan Front Mahasiswa Nasional (FMN) yang telah membantu memberikan data, wacana, gagasan ide dan kondisi gerakan sosial petani saat ini.
10. Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) dan Lembaga Hukum (LBH) Yogyakarta yang telah mengizinkan saya untuk meneliti di dalamnya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Semoga Allah SWT, memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya, demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan sangat penulis harapkan dengan senang hati. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis, umumnya bagi kita semua.

Yogyakarta, 13 Januari 2016

Fuat Hasan
NIM. 11250100

ABSTRAK

Kata Kunci : Strategi Perlawanan, Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP)

Penelitian ini membahas tentang strategi perlawanan petani yang dilakukan oleh Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) Kulon Progo, Yogyakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan strategi advokasi PPLP dalam menolak tambang pasir besi oleh Pemerintah DIY dan PT. Jogja Magasa Iron (JMI).

Pertanyaan pokok yang diangkat dalam penelitian ini adalah, Bagaimana kemunculan Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo sebagai gerakan sosial yang memobilisasi perlawanan petani untuk menolak tambang pasir besi di Kulon Progo, Yogyakarta? *Kedua*, Bagaimana strategi advokasi yang digunakan oleh PPLP dalam rangka menolak rencana penambangan pasir besi oleh PT JMI dan Pemerintah?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan menggunakan metode deskriptif analitis untuk menganalisis data-data yang diperoleh. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, pengumpulan dokumen serta wawancara mendalam dengan delapan informan, antaralain; Sekjen PPLP, Anggota PPLP, warga yang bersikap netral, Para Legal LBH, advokat LBH yang pernah mendampingi PPLP dan warga pendatang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Konflik tambang pasir besi ini pada dasarnya merupakan konflik perebutan sumber daya alam antara pemerintah DIY dengan masyarakat petani Kulon Progo, yang timbul karena adanya hasrat pembangunan yang begitu kuat dengan dukungan investor sebagai stimulusnya. Selain itu, ketidak-jelasan status tanah dan klaim sepihak dari Pakualaman membuat masyarakat petani tidak tinggal diam. Mereka memutuskan untuk menolak tambang pasir besi dengan harga mati.

Strategi perlawanan yang digunakan PPLP dalam perjuangan menolak tambang pasir besi begitu beragam, baik dalam ranah hukum, politik maupun aksi langsung. Ciri khas dari perlawanan PPLP adalah gerakannya yang beraksi secara reaksioner, sehingga menjadikan pola gerakan PPLP tersebut tidak mudah dibaca oleh pihak lawan. Akan tetapi, PPLP tidak menjadikan advokasi litigasi sebagai tujuan utama dari perlawanan petani.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAKS	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR BAGAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penagasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	4
C. Rumusan Masalah	17
D. Tujuan penelitian	18
E. Kajian Pustaka	19
F. Kerangka Teori	23
1. Tinjauan tentang Gerakan Perlawanan Petani	23
1.1. Definisi Gerakan Petani	23
1.2. Munculnya Gerakan Perlawanan Petani	28
2. Tinjauan tentang Advokasi	30
2.1. Advokasi dan Jenisnya	30
2.2. Proses Advokasi dan Penyusunan Strategi	32
2.3. Pola Kerja Advokasi	37
G. Metode Penelitian	38
1. Lokasi Penelitian	38
2. Jenis dan Pendekatan Penelitian	40
3. Subyek Dan Obyek Penelitian	41
4. Teknik Pemilihan Sampel	41
5. Metode Pengumpulan Data	42
a. Observasi	43

b. Wawancara	44
c. Dokumentasi	45
6. Teknik Validitas Data	45
7. Analisis Data	46
H. Sistematika Pembahasan	47
BAB II DESA BUGEL DALAM PROYEK PENAMBANGAN.....	49
A. Kondisi Umum dan Perkembangan Wilayah.....	49
1. Letak dan Kondisi Geografis Desa Bugel	53
1.1 Jumlah dan Usia Penduduk.....	55
1.2 Pekerjaan Penduduk	56
1.3. Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat.....	58
2. <i>Setting</i> Lahan Pasir Besi.....	62
2.1. Lahan Pasir Bagi Petani.....	62
2.2. Rencana Penambangan Pasir Besi	65
3. Status Tanah Pasir Besi	68
B. Sejarah PPLP-KP	72
1. Visi dan Misi	74
2. Struktur Kepengurusan	75
3. Program-program PPLP	76
BAB III STRATEGI PERLAWANAN PPLP KULON PROGO	80
A. Gerakan Perlawanan PPLP	80
1. Kemunculan PPLP sebagai Gerakan Petani.....	80
2. Sejarah Perlawanan PPLP	85
3. Pola Perlawanan	96
4. Pemetaan Aktor	99
B. Strategi Advokasi PPLP	103
1. Advokasi Kasus	104
2. Advokasi Kelas.....	107
3. Proses-proses Advokasi.....	111
3.1. Proses Legislasi dan Yuridiksi.....	111
3.2. Proses Politik dan Birokrasi	112

3.3. Proses Sosialisasi dan Mobilisasi	113
4. Penyusunan Strategi Advokasi.....	114
4.1. Pembayangan.....	114
4.2. Analisis Konteks Makro	116
4.3. Mendefinisikan Masalah dan Membingkai Isu	118
4.4. Menentukan Tujuan.....	120
4.5. Analisis <i>Steakholder</i>	121
4.6. Penyusunan Kegiatan Strategi dan Taktik.....	124
4.7. Pelaksanaan Strategi dan Taktik.....	126
4.8. Evaluasi Dampak.....	128
4.9. Penerapan Pembelajaran Advokasi	130
5. Pola Kerja Advokasi	132
5.1. Kerja Garis Depan	132
5.2. Kerja Pendukung	132
5.3. Kerja Basis.....	133
BAB IV PENUTUP	138
A. Kesimpulan	138
B. Saran	141

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel. 1	Jumlah Penduduk Bugel I dan Bugel II	54
Tabel. 2	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Usia.....	56
Tabel. 3	Jumlah Warga Berdasarkan Pekerjaan.....	57
Tabel. 4	Dinamika Konflik Pasir Besi	86



DAFTAR GAMBAR

Gambar. I	Lahan Pertanian Semangka Setelah Dipanen.....	63
Gambar II.	Posko Anti Tambang Pasir Besi PPLP	74
Gambar. III	Baliho Penolakan Tambang Pasir Besi PPLP	85
Gambar. IV	Demonstrasi PPLP di Malioboro	97
Gambar. V	Surat Keramat PPLP.....	124
Gambar. VI	Demonstrasi PPLP di UGM.....	128
Gambar VII	Penyablonan Kaos PPLP	137

DAFTAR BAGAN

Bagan. I	Proses Advokasi dan Penyusunan Strategi.....	37
Bagan. II	Tiga Pola Dasar Advokasi.....	38
Bagan. III	Pemetaan Konflik Pasir Besi	100
Bagan. IV	Pemetaan Aktor	102



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul “STRATEGI PERLAWANAN PETANI (*STUDI KASUS ATAS PERJUANGAN PAGUYUBAN PETANI LAHAN PANTAI (PPLP) DALAM KONFLIK SENGKETA LAHAN DI PESISIR SELATAN KULON PROGO YOGYAKARTA*)”. Agar tidak terjadi kesalah-pahaman terhadap judul skripsi ini, maka peneliti perlu memberikan penjelasan mengenai beberapa istilah dalam judul tersebut. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan yaitu:

1. Strategi Perlawanan Petani

Dalam penelitian ini, strategi perlawanan petani yang dimaksudkan adalah strategi advokasi. Agar cakupan pembahasannya tidak terlalu melebar, maka yang dimaksud dengan strategi advokasi ialah mobilisasi segala sumber daya untuk mewujudkan tujuan advokasi. Sumber daya yang dimobilisasi dapat berasal dari internal jejaring, dan dari luar jejaring. Menurut Sigit Pamungkas dkk, dalam buku *Advokasi Berjejaring*, menyatakan bahwa penyusunan strategi dalam melakukan advokasi berangkat dari asumsi bahwa sebuah tujuan mustahil tercapai apabila tidak ada upaya untuk mencapainya. Sebab, kerja-kerja yang terorganisir lebih memastikan pada tercapainya sebuah tujuan secara terukur.¹ Sementara

¹Sigit Pamungkas dkk, *Advokasi Berbasis Jejaring*, (Yogyakarta: FISIPOL, Universitas Gajah Mada, 2010), hlm. 60.

Miller dan Covey, merumuskan strategi advokasi sebagai rencana tindakan untuk mempengaruhi kebijakan, program, perilaku dan praktik publik.²

Dari uraian di atas, maka strategi advokasi yang dimaksudkan oleh peneliti ialah cara-cara yang terencana dan terarah, yang digunakan dalam melakukan advokasi terhadap sebuah permasalahan.

2. Konflik Sengketa Lahan

Sebelumnya perlu diketahui bahwa kata konflik dan sengketa disini, merupakan dua kata yang berbeda. Meskipun keduanya sama-sama memiliki pengertian tentang adanya perbedaan kepentingan diantara kedua belah pihak atau lebih. Namun disini kata tersebut akan dibedakan dalam pengertiannya.

a. Pengertian Konflik

Konflik berasal dari kata kerja Latin *configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Sementara menurut Bernhard Limbong, yang mengutip Tauqiri menjelaskan bahwa konflik merupakan warisan kehidupan sosial yang boleh berlaku dalam berbagai keadaan akibat bangkitnya keadaan ketidak-setujuan, kontroversi dan pertentangan diantara dua pihak atau lebih secara berterusan.³

²Valerie Miller dan Jane Covey, *Pedoman Advokasi Perencanaan, Tindakan, dan Refleksi*, (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm.

³Bernhard Limbong, *Konflik Pertanahan* (Jakarta: Margaretha Pustaka, 2012), hlm. 29-30.

b. Sengketa Lahan/ Pertanahan

Menurut Bernhard Limbong, definisi mengenai sengketa pertanahan mendapat sedikit penekanan dalam Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengolahan Pangkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, yang mengatakan bahwa sengketa pertanahan adalah perselisihan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio-politis. Sengketa tanah dapat berupa sengketa administratif, sengketa perdata, sengketa pidana terkait dengan kepemilikan, transaksi, pendaftaran, penjaminan, pemanfaatan, penguasaan, dan sengketa hak ulayat.⁴

Jadi, yang dimaksudkan dengan konflik sengketa lahan disini adalah adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi, dimana keduanya saling mempersalahkan suatu objek tertentu, yang dalam hal ini adalah lahan, dikarenakan kesalah-pahaman atau perbedaan pendapat atau persepsi antara keduanya sehingga melibatkan hukum pada keduanya.

3. Pesisir Selatan Kulon Progo Yogyakarta

Kata pesisir berarti tanah datar dekat pantai yang berpasir. Tanah tersebut berada di daerah sepanjang tepi pantai.⁵ Sedang Kulon Progo merupakan salah satu kabupaten yang berada di Kawasan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Kulon Progo berbatasan langsung dengan laut

⁴*Ibid.*, hlm 49.

⁵Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pelita Harapan, 1994), hlm. 1052.

selatan atau Samudra Hindia. Oleh karena itu, sangatlah wajar jika lahan di Kawasan Pesisir Selatan Kulon Progo adalah lahan tanah pasir.

Berdasarkan uraian singkat di atas, istilah Pesisir Selatan Kulon Progo adalah lahan pasir pantai yang berada di sebelah Selatan Kulon Progo dan berbatasan langsung dengan lautan. Kawasan Pesisir Selatan Kulon Progo mencakup beberapa desa yang membentang dari arah barat ke timur. Salah satu desa dari beberapa desa yang membentang dari arah Barat Ke Timur yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Desa Bugel.

Dari semua uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa istilah “Strategi Perlawanan Petani (Studi Kasus Atas Perjuangan Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) Dalam Konflik Sengketa Lahan di Pesisir Selatan Kulon Progo Yogyakarta)” mengandung arti strategi-strategi advokasi yang dilakukan oleh PPLP dalam memperjuangkan haknya sebagai petani, yang sekaligus menolak rancana penambangan pasir besi di pesisir selatan Kulon Progo, Yogyakarta.

B. Latar Belakang

Membicarakan masalah agraria tentu tidak menarik jika tanpa menengok sejarahnya, yang sejak zaman kolonial bahkan jauh sebelumnya yakni di masa kerajaan, hingga kini sejarah pertanahan (yang identik dengan nasib kehidupan petani itu) tidak banyak menunjukkan adanya tanda-tanda

perbaikan. Kehidupan petani selalu terombang-ambing oleh ketidak-pastian akibat kebijakan negara tentang pertanahan yang sering berubah-ubah.⁶

Akibatnya, masalah tanah masih saja menjadi persoalan yang seringkali memunculkan perlawanan dari rakyat. Sebab bagi masyarakat agraris, tanah mempunyai arti yang sangat penting baik sebagai sumber penghidupan maupun sebagai penentu tinggi rendahnya status sosial dalam masyarakat. Tanah mencerminkan bentuk dasar kemakmuran sebagai sumber kekuasaan ekonomi dan politik, serta mencerminkan hubungan dan klasifikasi sosial. Falsafah Jawa, *sadhumuk bathuk sanyari bumi, yen perlu ditohi pati*⁷, menunjukkan betapa eratnya hubungan antara manusia dengan tanah yang dimilikinya. Setiap jengkal tanah merupakan harga diri yang akan dipertahankan mati-matian dengan seluruh jiwa dan raga.⁸

Bukti dari tegaknya prinsip tersebut adalah catatan Ong Hok Ham, yang mencatat telah terjadi lebih dari 100 pemberontakan atau keresahan petani, terhitung sejak pemberontakan Diponegoro di tahun 1830 sampai permulaan pergerakan nasional tahun 1908. Beberapa diantaranya adalah perang Diponegoro 1830, peristiwa spektakuler pemberontakan petani Banten 1888, peristiwa Cimareme 1919 (berupa demonstrasi), perlawanan si Pitung (tindakan individu), pemberontakan Ciomas 1886, Gerakan Rakyat Samin,

⁶Mustain, *PETANI vs NEGARA; Gerakan Sosial Petani Melawan Hegemoni Negara*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), hlm. 13.

⁷Ungkapan ini sengaja dimunculkan oleh rakyat “Jawa” untuk mengobarkan semangat dalam mempertahankan setiap jengkal tanahnya dalam peperangan melawan kolonial Belanda. Artinya adalah ‘satu sentuhan kening, satu jari luasnya bumi bertaruh nyawa’. Sadumuk bathuk dimaknai sebagai penghinaan berat, orang yang keningnya ditunjuk sebagai ungkapan tidak mampu berfikir. Dalam adat Jawa dikenal dengan istilah ‘amuk’.

⁸Ririn Darini, Makalah, *Sengketa Agraria: Kebijakan dan Perlawanan dari Masa ke Masa*, TT, hlm. 1.

Peristiwa Entong Gendung 1916 sampai kepada pemberontakan Sarekat Islam lokal.⁹

Perlawanan dari petani terus berlanjut hingga pada zaman penjajahan Jepang, berupa pendudukan tanah eks perkebunan terlantar.¹⁰ Dilanjutkan di masa Orde Lama, Orde Baru, Reformasi dan hingga saat ini, gerakan perlawanan petani masih tetap eksis di dalam sendi-sendi masyarakat.

Sejarah perlawanan petani ini, oleh Desi Rahmawati digolongkan menjadi tiga fase atas perubahan pola gerakan petani di Indonesia.¹¹ Menurutnya, fase pertama disebut sebagai gerakan petani tradisional yang muncul pada masa kolonial. Dimana pada masa ini, kekuasaan struktur sosial masyarakat pun diwarnai oleh perbedaan status sosial dan ekonomi yang sangat mencolok. Di sisi lain, kekuasaan politik dan ekonomi dipegang oleh penguasa kolonial. Kebijakan-kebijakan produk kolonial seperti sistem leverensi dan kontingensi, *land rent*, sistem tanam paksa dan sebagainya, semakin menempatkan posisi masyarakat (petani) pada lapisan terbawah yang tidak memiliki akses apapun untuk memperbaiki nasibnya.¹² Hal inilah yang oleh James Scott dikatakan sebagai suatu faktor yang menentukan terjadinya pemberontakan petani, yang dimana pemberontakannya tersebut, bertumpu

⁹Barid Hardiyanto, *Pendidikan Rakyat Petani, Perjuangan Perlawanan Menuntut Hak atas Tanah*, cet. I (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), hlm. 17.

¹⁰*Ibid*, hlm.17.

¹¹Desi Rahmawati, "Gerakan Petani Dalam Konteks Masyarakat Sipil Indonesia, Studi Kasus Organisasi Petani Serikat Tani Merdeka (SeTAM)", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 6, Nomor 3, Maret 2003 (329-358), hlm. 332.

¹²*Ibid*, hlm. 332.

pada subsistensi petani yang terganggu oleh beberapa aturan kolonial yang memberatkan petani, seperti beban pajak yang harus ditanggung oleh petani.¹³

Oleh karena itu, gerakan petani gelombang pertama yang merupakan manifestasi protes sosial terhadap segala ketimpangan dan konflik kepentingan ini, lebih ditandai dengan adanya pembentukan solidaritas yang bersifat komunal dan diperkuat dengan ide-ide tradisional seperti *mesianisme* dan *nativisme*. Sehingga solidaritas yang terbentuk pun didasarkan pada semangat-semangat primordialisme, tanpa mengedepankan rasionalitas yang didasarkan atas pertimbangan demi kepentingan bersama.¹⁴ Salah satu contoh kasus yang paling fenomenal dari gerakan ini adalah pemberontakan petani yang terjadi di Banten.

Dalam studi yang dilakukan oleh Kartodirjo atas pemberontakan petani Banten pada tahun 1888, dijelaskan bahwa adanya ketidak-cocokan yang tajam antara aspek-aspek tertentu dari praktek keagamaan tradisional dan lembaga-lembaga kolonial, yang menimbulkan perasaan getir di kalangan pribumi yang merasa bahwa kebudayaan mereka sendiri akan mengalami kemunduran. Pembela-pembela tradisi, yang dirasuki paham-paham mengenai perang sabil melawan kekuasaan orang-orang kafir, menginginkan dipulihkannya tatanan tradisional dan mereka mengobarkan rasa permusuhan terhadap kaum penjajah. Sementara kaum elit agama yang berperan sebagai

¹³James c. Scott, *Moral Ekonomi Petani; Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*, (Jakarta: LP3S, 1994), hlm. 141.

¹⁴Desi Rahmawati, "Gerakan Petani", hlm. 332-333.

pemegang otoritas gerakan, dalam membangun kekuatan utama gerakannya, mereka menggunakan tarekat Sufi sebagai landasan organisasinya.¹⁵

Dalam gerakan petani Banten tersebut juga dikenal adanya sifat-sifat perbanditan meskipun sudah mulai ada pengorganisasian secara sederhana (baru pada tingkat intern kelompok), adanya teknik komunikasi untuk menjaga kerahasiaan gerakan, digunakan centeng/ tukang pukul sebagai ujung tombaknya, dan sebagainya. Namun, karena bergerak secara parsial, bersifat lokal, berbau kekerasan, pergerakannya relatif tidak terorganisir, dan tergantung pada pemimpin dalam artian tidak ada tahapan-tahapan yang direncanakan di tingkatan struktur organisasi. Oleh sebab itu, gerakan pada masa ini mudah dipatahkan.¹⁶

Fase kedua gerakan petani, terjadi pada masa transisi antara zaman kemerdekaan, hingga masa orde lama. Meskipun, menurut J. Sembiring dalam jurnal hukumnya menyatakan bahwa pada masa pendudukan Jepang, Pemerintah Bala Tentara Jepang telah menyemai bibit konflik dengan melakukan ekspansi penanaman pangan dan konservasi tanaman perkebunan dengan pembagian tanah-tanah perkebunan kepada penduduk. Akan tetapi, hal ini terbukti setelah kemerdekaan bahwa hanya mereka yang direstui oleh Pemerintah Jepang saja yang dapat melakukan okupasi atas tanah-tanah perkebunan, sehingga menimbulkan pertarungan elit politik baik di tingkat

¹⁵Sartono Kartodirdjo, *Pemberontakan Petani Banten 1888*, cet. I (Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1984), hlm. 445-446.

¹⁶Desi Rahmawati, "Gerakan Petani", hlm. 333.

lokal maupun nasional.¹⁷ Namun, dalam penelitian ini fase kedua dihitung semenjak berakhirnya pemerintahan kolonial yang mewariskan permasalahan bagi bangsa Indonesia.

Permasalahan yang dimaksudkan berupa banyaknya ketimpangan penguasaan dan kepemilikan sumber-sumber agraria yang terjadi di masyarakat. Ketimpangan tersebut terjadi ketika paska kemerdekaan. Fakta menunjukkan bahwa 70 persen petani di negeri ini hanya menguasai 13 persen dari total lahan pertanian, sementara 30 persen sisanya justru menguasai 87 persen lahan yang ada.¹⁸

Sementara itu, pada waktu yang sama para petani juga telah melakukan pendudukan liar atas tanah-tanah perkebunan milik Belanda yang ditinggalkan. Akan tetapi, persoalan yang sebenarnya baru muncul ketika penandatanganan persetujuan KMB pada tahun 1949. Pemerintah RIS memberikan pengakuan hak orang asing akan tanah, yaitu hak konsesi dan hak *erfpacht* serta hak untuk mengusahakan selanjutnya. Sehingga, pendudukan lahan oleh petani tersebut tidak memiliki hukum yang sah sebagaimana yang dimiliki pengusaha perkebunan.¹⁹ Oleh karena itu, gerakan petani pada masa Orde Lama, lebih berkaitan dengan intervensi dari partai politik dalam *memblow-out* masalah tanah sebagai isu kepentingan partai.²⁰

¹⁷J. Sembiring, "Konflik Tanah Perkebunan di Indonesia", Jurnal Hukum No. 3 Vol. 16 Juli 2009 (337-353), hlm. 341.

¹⁸Tim Peneliti SPTN, *Kebijakan, Konflik, dan Perjuangan Agraria Indonesia Awal Abad 21 (Hasil Penelitian Sistematis SPTN, 2012)*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta, 2012, hlm. 73.

¹⁹Ririn Darini, "Sengketa Agraria", hlm. 7.

²⁰Mustain Masud, "Refleksi Gerakan Rakyat Lereng Gunung Semeru di Era Reformasi 1997", Ringkasan Desertasi yang berjudul GERAKAN PETANI DI PEDESAAN JAWA TIMUR PADA ERA REFORMASI: *Studi Kasus Gerakan Reclaiming oleh Petani atas Tanah yang Dikuasai PTPN XII di Kalibakar, Malang Selatan*, hlm. 1.

Dimasa ini pula perlawanan petani juga semakin diperkuat dengan adanya kebebasan berorganisasi ataupun berserikat, misalnya seperti Barisan Tani Indonesia (BTI) yang merupakan *underbrow* Partai Komunis Indonesia (PKI), juga Rukun Tani Indonesia (RTI), Serikat Buruh Perkebunan Indonesia (Sarbupri) dan Persatuan Tani Nasional Indonesia (Petani). Organisasi-organisasi tersebut juga berafiliasi dengan partai politik, sehingga perlawanan mereka semakin kuat. Bukti dari hal tersebut adalah terjadinya Peristiwa Tanjung Morawa pada tanggal 16 Maret 1953 yang menyebabkan jatuhnya kabinet Wilopo dan dibentuknya Kementrian Urusan Agraria.²¹

Hasil puncak dari perjuangan petani dimasa ini, ialah lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria 1960 (UUPA). Undang-undang tersebut, merupakan hasil kerja panitia yang dibentuk pemerintah Soekarno, dan telah diakui secara legal sebagai landasan hukum pertanahan yang sah (Tap MPR No. IV/ 1978). Namun, kebijakan agraria tersebut oleh Soeharto diganti karena rezim ini mempunyai asumsi berbeda dalam melihat pembangunan.²²

Dengan karakter otoritarianismenya, upaya rezim Orde Baru dalam rangka menyingkirkan kebijakan agraris dari kekuasaan dilakukan dengan empat cara. *Pertama*, menjadikan masalah *land reform* hanya sebagai masalah teknis belaka. Status kedudukan Departemen Agraria diturunkan menjadi setingkat dirjen. *Kedua*, Undang-undang Pokok Agraria tidak dijadikan sebagai payung bagi perumusan undang-undang sektoral, seperti pertambangan, kehutanan, dan perairan. Bahkan undang-undang sektoral

²¹Karl J. Pelzer, *Sengketa Agraria: Pengusaha Perkebunan Melawan Petani*, cet. I (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991), hlm. 12.

²²*Ibid*, , hlm, 15-16.

yang dikeluarkan justru bertentangan dengan amanat UUPA. *Ketiga*, penerapan *floating mass* (kebijakan massa mengambang). Kebijakan ini merupakan upaya dipolitisasi masyarakat desa dengan melarang partai politik memiliki struktur cabang dan ranting. *Keempat*, penyeragaman pemerintah desa melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, serta penerapan Dwi fungsi ABRI. Upaya tersebut dilakukan untuk mengawasi dan mengontrol kehidupan masyarakat pedesaan.²³ Bahkan kekuatan petani hanya diberi satu wadah, yaitu HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia), yang di dalamnya sudah diisi dengan kepentingan-kepentingan politis dari penguasa atau alat kooptasi-korporasi negara.²⁴

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa peralihan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru, telah diikuti oleh peralihan strategi pembangunan nasional yang bertolak belakang. Ketika Orde Lama, strategi pembangunan ekonomi nasional diletakkan pada prioritas pelaksanaan pembaharuan agraria. Sebaliknya, rezim Orde Baru justru meletakkan pembangunan dengan memberikan ruang bebas bagi berkembangnya kapitalisme agraria.²⁵ Oleh karena itu, masa ini mengantarkan perjuangan petani kepada babak baru atau gelombang ke-tiga dari fase yang sebelumnya, yakni masa kolonial dan orde lama.

²³Noer Fauzi, *Petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 124.

²⁴Barid Hardiyanto, "Pendidikan Rakyat Petani", hlm. 17.

²⁵Heri Purwanto, "Serikat Petani Indonesia Dalam Perjuangan Pembaruan Agraria di Indonesia Periode 1998-2011", Tesis Tidak Diterbitkan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Jakarta, (2012), hlm. 5.

Pada masa ini karakteristik konflik pertanahan lebih bersifat vertikal antara pemegang hak dengan pengusaha yang berkolaborasi dengan penguasa (birokrasi pemerintah). Tanah pada kurun waktu ini dipandang sebagai bahan komoditas sebagai akibat dari pilihan paradigma pembangunanisme, *developmentalisme*.²⁶ Senada dengan hal itu, Noer Fauzi yang mengutip dari hasil rumusan kongres Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) pada tahun 1999, menyatakan bahwa:

Pada bidang ekonomi, luasnya tanah dan kekayaan sumber daya alam masyarakat adat telah menjadi objek bagi pemerintah dan pemodal untuk mengadakan proyek-proyek raksasa...berbagai undang-undang, seperti UU No. 5/ 1960, UU No. 5/ 1967, UU No.11/ 1967, telah memberikan kemudahan bagi pengusaha untuk mengambil tanah dan mengeksploitasi kekayaan alam kepunyaan masyarakat adat...konsep-konsep yang merugikan seperti “tanah negara” atau “hutan negara” telah menjadi alat yang ampuh untuk melumpuhkan kedaulatan masyarakat adat atas tanah dan kekayaan alamnya.²⁷

Sengketa tanah yang terjadi pada era Orde Baru, justru muncul dalam frekuensi yang lebih banyak dengan alasan yang berbeda.²⁸ Sengketa tanah perkebunan yang banyak terjadi khususnya di daerah-daerah kantong perkebunan seperti di Jawa dan Sumatra, muncul karena adanya penetapan baru, perpanjangan, maupun pengalihan Hak Guna Usaha atas lahan perkebunan dan atau bekas lahan perkebunan yang sudah digarap oleh rakyat.²⁹ Salah satu contoh kasusnya adalah konflik tanah di Jenggawah, Jember, Jawa Timur pada tahun 1979.

²⁶Mustain, “Petani vs Negara”, hlm. 20.

²⁷Noer Fauzi, *Memahami Gerakan Rakyat Dunia Ke-Tiga*, cet. I (Yogyakarta: INSISTPress, 2005), hlm. 124.

²⁸Gunawan Wiradadi, *Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir*, cet. I (Yogyakarta: Insist, 2000), hlm. 148.

²⁹Ririn Darini, “Sengketa Agraria”, hlm. 10.

Kasus yang melibatkan ratusan warga dan kemudian semakin merembet ke kecamatan-kecamatan yang lain di Jember serta diwarnai dengan kekerasan ini, sebenarnya dipicu oleh pengelola perkebunan yaitu PT XXVII yang berkepentingan untuk peningkatan produksi tembakau. Selain itu, terjadi penyempitan lahan yang menyebabkan pendapatan panen petani berkurang untuk memenuhi kebutuhan subsistennya. PT XXVII mengadakan *her-kaveling* dan *her-regristasi* lahan, dimana hal tersebut mendapat dukungan dari pemerintah daerah Kabupaten Jember tanpa adanya perundingan dan bermusyawarah dengan rakyat.³⁰

Dalam perkembangan selanjutnya, karena banyaknya kasus yang muncul pada masa Orde Baru, telah melahirkan semacam pembagian kerja ditingkat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memiliki kepedulian tinggi terhadap gerakan reformasi agraria. Mulai dari sinilah, gerakan petani mengalami perubahan besar pada pola pergerakan setelah dimasukinya ide pemberdayaan masyarakat dan demokratisasi yang memang pada mulanya banyak diusung oleh kalangan LSM. Kemudian pergeseran metode pemberdayaan yang terjadi pada LSM,³¹ pada akhirnya berkembang menjadi

³⁰Mohamad II Badri dkk, "Kontroversi Sertifikasi Tanah "Konflik Tanah Jenggawah" Tahun 1999-2001 (Studi Kasus Konflik Tanah di Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember)", Jurnal Ilmu Sejarah, Volume 1 No. 1, November 2013, hlm. 25-34.

³¹Pergeseran metode pemberdayaan ini, bila dulu masyarakat desa dipandang sebagai masyarakat yang benar-benar tidak berdaya sehingga harus diperjuangkan oleh 'kalangan kelas menengah' yang berpendidikan, maka setelah kelahiran metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA) pada awal 1990-an, peran orang luar (termasuk LSM) sedikit demi sedikit dikurangi dengan asumsi masyarakat desa, termasuk petani telah memiliki pengetahuan lokal. Hingga pada akhirnya, lahirlah kerangka besar metode advokasi, dimana pemberdayaan masyarakat tidak lagi sebatas menyuarakan kepentingan masyarakat ke jajaran pemerintah ataupun publik, penyuluhan ataupun pendidikan-pendidikan kritis ditingkat masyarakat, tetapi jauh lebih besar dari itu, yakni terciptanya organisasi rakyat marginal yang mengandalkan kekuatan atau kapasitas masyarakat itu sendiri. Lebih lanjut baca Jurnal Desi Rahmawati, "Gerakan Petani".

sebuah kerangka besar metode advokasi yang digunakan oleh LSM terhadap masyarakat.³² Pada masa ini pula, perlawanan yang dilakukan rakyat berkaitan dengan sengketa agraria, diwarnai pula dengan hadirnya kelompok mahasiswa dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH), selain LSM itu sendiri.³³

Ketimpangan struktur agraria warisan kolonial yang telah disebut di awal, terus berlanjut dan bahkan semakin dalam. Hasil dari Data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat, sepanjang 10 tahun (2004-2014), periode kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, terjadi 1.391 konflik agraria di Indonesia, dengan areal seluas 5.711.396 hektar. Terdapat lebih 926.700 keluarga menghadapi ketidak-adilan agraria. Berdasarkan sektor, konflik agraria di perkebunan 536 kasus, infrastruktur 515, kehutanan 140, tambang 90, pertanian 23, dan pesisir-kelautan berjumlah enam kasus. Ketidak-berpihakan pemerintah, menimbulkan intimidasi dan kriminalisasi terhadap masyarakat petani. Cara-cara represif oleh kepolisian dan militer pun terjadi hingga menimbulkan banyak korban petani dan komunitas adat. Selama periode itu, sekitar 1.354 orang ditahan, 553 luka-luka, 110 tertembak aparat, serta 70 orang tewas.³⁴

Secara historis, hal ini telah mengindikasikan bagaimana perjuangan para petani dalam menyambung hidup pada lahan pertanian yang semakin terbatas karena ulah pemerintah dan pemilik modal. Selain itu, juga

³²*Ibid.*, hlm. 334-335.

³³Ririn Darini, "Sengketa Agraria", hlm. 10-11.

³⁴Sapariah Saturi dkk, Hari Tani: Dari Ketimpangan penguasaan Lahan hingga Kemandirian Pangan, Situs Berita dan Informasi Lingkungan, <http://www.mongabay.co.id/2014/09/24/hari-tani-dari-ketimpangan-penguasaan-lahan-hingga-kemandirian-pangan/>, diunduh pada 28 febuari 2015, Pukul 11:42 WIB.

memperlihatkan bagaimana para petani mempertaruhkan eksistensinya sebagai petani. Faktor kesenjangan penguasaan dan kepemilikan tanah, dan terancamnya eksistensi diri petani, pada gilirannya menjadi penyebab utama atas terjadinya konflik pertanahan. Oleh karena itu, di dalam proses perkembangannya, banyak perkumpulan petani yang melihat bahwa hakikat kemanusiaan dalam perjuangan petani adalah penuntutan hak atas tanah.³⁵

Salah satu kasus yang menarik untuk diketahui di periode SBY adalah kasus sengketa lahan yang terjadi di Kulon Progo, Yogyakarta, yang dimana dalam kasus tersebut bertumpu pada perebutan sumber daya alam antara masyarakat petani dengan Kasultanan Yogyakarta. Sumber daya alam yang dimaksud yakni berupa lahan pasir di sepanjang pantai Kulon Progo yang saat itu merupakan lahan pertanian dan tempat tinggal bagi warga petani. Rencananya, lahan tersebut akan dijadikan area pertambangan. Berbagai pro dan kontra pun muncul ke permukaan dan sangat rentan menimbulkan konflik bahkan kekerasan.³⁶ Pasalnya, rencana penambangan pasir besi tersebut muncul dari desakan perusahaan keluarga Kasultanan/ Paku Alaman (Akta Notaris PT Jogja Magasa Mining) kepada pemerintah daerah.³⁷

Tanggapan dari masyarakat petani pesisir, keberadaan tambang pasir besi dapat menyebabkan rusaknya vegetasi dan kerusakan tanah baik secara

³⁵Barid Hardiyanto, "Pendidikan Rakyat Petani", hlm. 9.

³⁶Sovya Mardaningrum, *Dinamika Gerakan Sosial Petani Pesisir: Studi tentang Dinamika Perlawanan PPLP-KP dalam Merespon Relasi Korporasi Swasta dan Negara dalam Proyek 'Privatisasi' Pasir Besi di Kulon Progo*, Skripsi Tidak di Terbitkan, Jurusan Politik dan Pemerintahan, Universitas Gajah Mada Yogyakarta, tahun 2010, hlm. 4.

³⁷Hardi Junaedi, "Analisis Kasus Penambangan Pasir Besi di Kawasan Pertanian Lahan Pasir Kulon Progo Ditinjau dari Aspek Ekologi, Etnologi, Ekonomi, dan Teknologi", Artikel, <http://hardidbullier.blogspot.com/2011/11/analisis-kasus-penambangan-pasir-besi.html>, diunduh pada 16 febuari 2015, pukul 10:48 WIB.

fisik, kimia maupun biologis, serta dirasa tidak menghargai jerih payah petani yang mampu mengolah tanah tandus sehingga menjadi dapat ditanami. Sementara Pemerintah Daerah dan PT JMI berdalih bahwa 90% penggunaan tanah yang akan ditambang, merupakan tanah milik Pakualaman Ground. Padahal, tanah Pakualaman Ground yang berada di lahan yang akan dijadikan tambang pasir besi, tidak lebih dari 1/3 (sepertiga) jumlah keseluruhan luas areal yang akan ditambang. Ketidak-jelasan areal di mana tempatnya dan berapa luasnya, serta status tanah yang ada menjadikan konflik ini semakin meruncing dan berlarut-larut. Kedua kubu, yakni yang menolak tambang pasir besi dan kubu yang pro terhadap pertambangan, atau PT JMI dan Pemerintah Daerah, mengkalim bahwa mereka sama-sama benar.³⁸

Dalam upaya penolakannya tersebut, masyarakat petani Kulon Progo akhirnya membentuk sebuah organisasi gerakan yang dinamai dengan Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP). PPLP Kulon Progo merupakan gerakan yang diprakarsai oleh petani pesisir di Kulon Progo atas dasar spontanitas dan responbilitas. Dengan kata lain, gerakan petani tersebut merupakan bentuk mobilisasi politik petani penggarap lahan pantai yang tidak menginginkan lahan pertaniannya diubah menjadi lahan pertambangan.³⁹ Perlawanan PPLP ini, sudah berlangsung selama hampir delapan tahun hingga sampai saat ini.

³⁸ Aziz Setyawijaya dkk, Makalah dengan Judul “Gerakan Perlawanan: Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo”, Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada, TT.

³⁹ *Ibid.*, Makalah.

Dengan merujuk pada studi-studi terdahulu, soal konflik pertanahan ini agaknya memiliki kesamaan pada pola gerakannya, yakni dengan jalan ‘melawan’ ketika pemerintah menggalakkan kebijakan yang bersifat *top-down* kepada masyarakat petani. Sementara itu, untuk model perlawanannya sendiri, dalam studi-studi terdahulu yang menyangkut tentang gerakan petani, tidak dapat digeneralisasikan antara daerah satu dengan yang lain. Maka, diperlukan studi lebih lanjut untuk mengetahui strategi perlawanan yang digunakan oleh masyarakat petani Kulon Progo, yang dalam hal ini adalah PPLP.

Perlu dicatat bahwa perlawanan petani di era ini, merupakan kelanjutan perlawanan dari fase ketiga (Orde Baru) yang model perlawanannya telah melahirkan kerangka metode advokasi sebagaimana yang telah diuraikan di awal. Sehingga, yang menjadi titik fokus dari penelitian ini adalah strategi advokasi yang digunakan oleh PPLP. Selain itu, Kabupaten Kulon Progo yang masih merupakan bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta, dimana masyarakatnya juga diatur dengan hukum Undang-undang Keistimewaan (UUK), tentu dari studi ini akan menghasilkan temuan yang berbeda dari studi-studi yang sebelumnya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan tersebut, maka penelitian ini akan difokuskan untuk menjawab pertanyaan:

1. Bagaimana kemunculan Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo sebagai gerakan sosial yang memobilisasi perlawanan petani untuk menolak tambang pasir besi di Kulon Progo, Yogyakarta?
2. Bagaimana strategi advokasi yang digunakan oleh PPLP dalam rangka menolak rencana penambangan pasir besi oleh PT JMI dan Pemerintah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini, antara lain:
 - a. Mengetahui kemunculan PPLP sebagai organisasi serta perjuangannya.
 - b. Mengetahui strategi advokasi Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo dalam rangka menolak rencana penambangan pasir besi oleh PT JMI dan Pemerintah pada setiap tahunnya.
 - c. Memberikan gambaran tentang pelaksanaan strategi advokasi yang digunakan oleh Paguyuban Petani Lahan Pantai melalui kegiatan-kegiatan kolektif di masyarakat Kulon Progo.
 - d. Untuk mengetahui perkembangan dari metode advokasi yang digunakan oleh Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo.
2. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Sebagai bahan masukan dan evaluasi kepada Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo, dalam perjuangannya menggapai kesetaraan hak, yang bertujuan guna meningkatkan kesejahteraan hidup bagi para

petani. Sehingga derajatnya sebagai masyarakat petani, menjadi semakin terangkat kedudukannya dalam strata sosial di Indonesia.

- b. Dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan terutama dalam bidang Ilmu Kesejahteraan Sosial.

E. Kajian Pustaka

Untuk mendukung penelaahan yang lebih integral seperti yang telah diungkapkan dalam latar belakang masalah di atas, maka peneliti berusaha melakukan peninjauan lebih awal terhadap pustaka yang ada. Adalah hasil-hasil penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti, guna mendukung penelitian yang akan dilakukan serta untuk mengetahui keaslian hasil penelitian penulis sendiri. Hasil penelitian tersebut antara lain:

1. Sartono Kartodirdjo, *Pemberontakan Petani Banten 1888*. Studi ini membahas tentang pemberontakan yang terjadi di Banten dengan menggunakan pendekatan banyak faktor seperti halnya fenomena sosial yakni ditinjau dari aspek sosial, ekonomi, politik dan agama. Secara sederhana, pemberontakan tersebut terjadi karena pajak yang dikenakan pada rakyat miskin terlalu berat, masuknya perekonomian barat, serta adanya fanatisme di dalam agama. Para pemberontak menyampaikan ketidak-puasannya terhadap pemerintah dengan cara pemberontakan di daerah-daerah di Banten khususnya. Dimana pemberontakan ini dikepalai oleh kalangan elite-elite agama dengan menumpas para orang-orang yang dianggap menganut paham milenari atau mesianik. Selain itu,

ketidakpuasan rakyat kecil khususnya para petani, pada akhirnya mendorong mereka untuk melakukan pemberontakan dengan cara membunuh pejabat-pejabat pemerintah kolonial pada saat itu.

2. Wahyudi, *Formasi dan Struktur Gerakan Sosial Petani (studi Kasus Reklaming/ Penjarahan atas Tanah PTPN XII (Persero) Kalibakar Malang Selatan*. Dalam penelitiannya ini, Wahyudi fokus mengkaji tentang formasi dan struktur gerakan sosial petani Kalibakar yang terjadi dalam waktu 1992-1993 sampai tahun 2005. Hasil dari penelitiannya tersebut, disimpulkan bahwa formasi gerakan sosial petani Kalibakar ditentukan oleh *the important determinants* perilaku kolektif, struktur gerakan sosial petani selalu berubah-ubah, gerakan petani juga dipengaruhi aktor yang memiliki kesamaan nilai subyektif seperti ideologi dan pertimbangan untung-rugi, serta kemampuan membangun pola komunikasi yang efektif. Orientasi aktorpun berbeda-beda, para pemimpin gerakan sosial, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan mahasiswa aktivis berorientasi pada norma. Sedangkan petani biasa, *free riders* dan pemegang kekuasaan lebih pada interes ekonomi politik.
3. Tatik Setyorini, Skripsi dengan judul, *Pemanfaatan Lahan Tidur Untuk Peningkatan Usaha Pertanian Masyarakat di Pesisir Selatan Kulon Progo*. Fokus kajiannya adalah usaha meningkatkan pertanian melalui pemanfaatan lahan pasir pantai dan peran paguyuban petani dalam mendampingi petani di pesisir pantai Bugel Kulon Progo. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif. Hasil

penelitiannya menyatakan bahwa ada empat tahap dalam upaya meningkatkan pertanian di lahan pasir pantai, antara lain: pembersihan lahan, perataan lahan pasir yang bergelombang (berbukit), pemberian pupuk dan pengolahan lahan dengan dibajak. Adapun peran Paguyuban petani lahan pantai meliputi; peran edukasi, peran diseminasi inovasi, peran konsultasi, peran fasilitasi, dan peran penghubung. Sedang, peran paguyuban dalam menghadapi penambangan adalah melakukan advokasi.

4. Ahmad Setiadi, Tesis dengan judul *Advokasi Dalam Penyelesaian Konflik Agraria (Suatu Studi Advokasi di Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap oleh Rumah Aspirasi Budiman)*". Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa advokasi yang dilakukan oleh RAB telah berhasil menyelesaikan konflik agraria di Cipari. Sementara, proses advokasi dalam penyelesaian konflik agraria di Cipari telah menunjukkan proses penyelesaian konflik agraria dengan mekanisme advokasi dan politik yang santun. Tekanan tidak lagi menggunakan memobilisasi massa atau demonstrasi, yang sering mengakibatkan kekerasan dan menimbulkan korban, akan tetapi tekanan lebih menggunakan lobi dengan otoritas pengawasan dan legislatif Budiman Sudjatmiko sebagai anggota DPR RI.
5. Sovya Mardaningrum, Skripsi dengan judul, *Dinamika Gerakan Sosial Petani Pesisir : Studi Tentang Dinamika Perlawanan PPLP-KP dalam Merespon Relasi Korporasi Swasta dan Negara dalam Proyek 'Privatisasi' Pasir Besi di Kulon Progo*, tahun 2010. Pokok

pembahasannya lebih menitik beratkan pada dinamika atau pasang-surut organisasi PPLP-KP dalam perjuangannya semenjak tahun 2007 silam. Penelitian ini menggunakan metode *Case Study research*, dengan hasil penelitiannya disimpulkan bahwa dinamika gerakan sosial petani yang tergabung dalam PPLP-KP, dipengaruhi oleh sumber daya organisasional, struktur kesempatan serta perdebatan tentang berbagai isu lingkungan, tanah dan potensi tambang dihembuskan.

6. Artikel yang ditulis oleh Desi Rahmawati yang berjudul, *Gerakan Petani Dalam Konteks Masyarakat Sipil Indonesia, Studi Kasus Organisasi Petani Serikat Petani Merdeka (SeTAM)*. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa gerakan SetAM merupakan gerakan yang dimaksudkan untuk mengupayakan sebuah posisi tawar masyarakat petani dengan negara sebagai pembuat keputusan (*decision marker*). Dengan memetakan konflik yang terjadi di Cilacap ketika masa Orde Baru, didapati adanya dua kubu yang saling bersebrangan, yaitu aliansi kekuatan unsur-unsur pemerintah, militer dan pengusaha perkebunan yang berhadap-hadapan dengan masyarakat yang dalam hal ini hanya didukung oleh jaringan LSM pendamping.
7. Artikel yang ditulis oleh Wasisto Raharjo Jati dalam Jurnal HAM dan Demokrasi Vol. 10, 2013 yang berjudul, *Predatory Regime Dalam Ranah Lokal: Konflik Pasir Besi di Kabupaten Kulon Progo*. Artikel ini mencoba menganalisa konflik perebutan sumber daya alam (pasir besi) yang terdapat di Kulon Progo. Didapati bahwa kontestasi konflik berpusat pada

pengaturan sumber daya alam antara paradigma developmentalisme dan ekologi. Developmentalisme mempresentasikan pertumbuhan ekonomi tinggi berdasarkan pada eksploitasi sumber daya alam, sedang ekologi menghendaki adanya keseimbangan antara manusia dan lingkungan dalam pengaturan sumber daya alam. Adanya temuan pasir besi yang terdapat di Kulon Progo tidak terlepas dari narasi rivalitas tersebut dimana petani melawan koalisi besar antara pemerintah dan korporasi. Hal menariknya adalah aliansi tersebut dibangun atas dasar patrimonialisme dan feodalisme yang eksis di Yogyakarta. Sehingga, implikasinya adalah gerakan petani menjadi sempit dan terbatas pada lingkungan mereka saja.

F. Kerangka Teori

1. Tinjauan tentang Gerakan Perlawanan Petani

1.1. Definisi Gerakan Petani

Dalam sketsa teoritik ilmu sosial, penjelasan mengenai gerakan sosial begitu beragam serta tidak dapat digeneralisir antara teori yang satu dengan yang lain. Akan tetapi, jika diruntut dari kemunculannya kajian gerakan sosial dimasa awal lebih berkonsentrasi pada aksi-aksi yang dilakukan oleh kelas pekerja, dimana ekonomi menjadi faktor determinis untuk menggerakkannya. Pemikiran ini bisa dijumpai dalam teori Marxisme tradisional dimana hubungan produksi merupakan landasan dalam kehidupan masyarakat yang kemudian melahirkan dua kelas yang berbeda, yaitu pekerja dan pemilik alat produksi dengan kepentingannya masing-masing. Dari kepentingan

yang berbeda tersebut, maka lahirlah pertentangan atau dikenal juga dengan istilah “perjuangan kelas”, yakni dimana kelas yang didominasi atau tereksplorasi akan melakukan penentangan dan mengambil alih alat produksi. Oleh karena itu, sejarah masyarakat merupakan sejarah perjuangan kelas. Kelas yang akan menjadi pemenang adalah kelas yang memiliki alat produksi karena secara ekonomi lebih baik dan lebih memiliki daya tawar yang lebih baik.⁴⁰

Menurut Antony Giddens, gerakan sosial adalah suatu upaya kolektif untuk mengejar suatu kepentingan bersama atau gerakan mencapai tujuan bersama melalui tindakan kolektif (*collective action*) di luar lingkup lembaga-lembaga yang mapan.⁴¹ Pendapat ini hampir serupa dengan Sidney Tarrow, yang berpendapat bahwa gerakan sosial lebih dimaknai sebagai politik perlawanan yang terjadi ketika rakyat biasa yang bergabung dengan para kelompok masyarakat yang lebih berpengaruh dalam menggalang kekuatan untuk melawan elit, pemegang otoritas dan pihak-pihak lawan lainnya. Ketika perlawanan ini didukung oleh jaringan sosial yang kuat dan digaungkan oleh resonansi cultural dan simbol-simbol aksi, maka politik perlawanan mengarah ke interaksi yang berkelanjutan dengan pihak-pihak lawan, dan kemudian hasilnya adalah gerakan sosial.⁴²

⁴⁰Mansour Fakih, *Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*, (Jakarta: Pustaa Pelajar, 2004), hlm. 50.

⁴¹Fadillah Putra Dkk, *Gerakan Sosial*, (Malang: Aerrors Prees, 2006), hlm. 3.

⁴²Sidney Tarrow, *Power in Movement, Social Movement and Contentius Politics*, (Cambride: University Prees, 1998), hlm. 4.

David Mayer dan Sidney Tarrow, dalam karyanya yang berjudul *Social Movement Society*, telah memasukkan semua ciri-ciri gerakan sosial dan mengajukan sebuah definisi yang lebih inklusif tentang gerakan sosial. Menurutnya, gerakan sosial adalah tantangan bersama yang didasarkan atas tujuan dan solidaritas bersama, dalam interaksi yang berkelanjutan dengan kelompok elit, saingan atau musuh dan pemegang otoritas.

Bagi Tarrow, konsep gerakan sosial harus memiliki empat *propert* dasar, antarlain:⁴³

a. Tantangan Kolektif (*Collective Challenge*)

Perbedaan antara gerakan sosial dengan tindakan-tindakan kolektif lain adalah bahwa gerakan sosial selalu ditandai dengan tantangan-tantangan untuk melawan melalui aksi langsung yang mengganggu terhadap para elit, pemegang otoritas, kelompok-kelompok lain, atau aturan-aturan kultural tertentu. Tantangan kolektif seringkali ditandai oleh tindakan mengganggu, menghalangi atau membuat ketidakpastian terhadap aktivitas-aktivitas pihak lain. Tantangan kolektif ini merupakan karakteristik paling umum dari gerakan sosial. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa gerakan sosial biasanya kurang memiliki sumberdaya yang stabil (dana, organisasi, akses terhadap negara). Dalam menghampiri konstituen

⁴³*Ibid.*, hlm. 4-7.

baru dan menegaskan klaim-klaim mereka, penentang (*contention*) mungkin hanya satu-satunya sumberdaya yang bisa dikuasai.

b. Tujuan Bersama (*Common Purpose*)

Ada banyak alasan yang bisa dikemukakan tentang mengapa orang bergabung dalam suatu gerakan sosial, mulai dari hanya sekedar keinginan nakal, mencemooh otoritas, hingga insting gerombolan yang tidak jelas tujuannya. Namun, jika ada alasan yang paling jelas mengapa orang terikat bersama dalam gerakan, adalah untuk menyusun klaim bersama menentang pihak lawan, pemegang otoritas, atau para elit. Tidak semua konflik semacam itu muncul dari kepentingan kelas, tetapi nilai dan kepentingan bersama dan tumpang tindih merupakan basis dari tindakan-tindakan bersama.

c. Solidaritas dan Identitas Bersama

Sesuatu yang menggerakkan secara bersama-sama (*common denominator*) dari gerakan sosial adalah pertimbangan partisipan tentang kepentingan bersama yang kemudian mengantarai perubahan dari sekedar potensi gerakan menjadi aksi nyata. Dengan cara menggerakkan konsesus, perancang gerakan memainkan peran penting dalam merangsang munculnya konsesus semacam itu. Namun para pemimpin hanya dapat menciptakan suatu gerakan sosial ketika mereka menggali lebih dalam perasaan-perasaan solidaritas atau identitas, yang biasanya bersumber pada nasionalisme, entitas atau keyakinan agama.

d. Memelihara politik perlawanan

Hanya dengan cara memelihara aksi kolektif melawan pihak musuh, suatu episode perlawanan bisa menjadi sebuah gerakan sosial. Tujuan kolektif, identitas bersama, dan tantangan yang dapat diidentifikasi membantu gerakan untuk memelihara politik perlawanan ini. Sebaliknya, jika mereka tidak mampu memelihara tantangan bersama, maka gerakan mereka akan menguap menjadi semacam kebencian atau kemarahan individual, atau berubah menjadi sekte religius, atau mungkin menarik diri dari ide dalam isolasi. Oleh karena itu, memelihara aksi kolektif dalam interaksi dengan pihak lawan yang kuat menandai titik pergeseran dimana suatu penentang (*contention*) berubah menjadi suatu gerakan sosial.

Sementara untuk pengertian petani sendiri, penulis merujuk pada studi Wahyudi yang memilih istilah *paesant* dan bukan *farmer*. Istilah *paesant* lebih diterjemahkan sebagai buruh tani, atau petani yang tidak memiliki lahan, atau petani yang hasil produksinya hanya dapat untuk mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya, bukan untuk diperdagangkan untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersier. Sedangkan istilah *farmer*, lebih diberi pengertian sebagai petani yang memiliki lahan sendiri, petani yang

hasil produksinya sudah lebih jika hanya untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder saja.⁴⁴

Dengan demikian, yang dimaksud dengan gerakan petani disini adalah gerakan sosial yang dilakukan oleh petani. Dimana oleh Wahyudi, dijelaskan lebih lanjut bahwa gerakan sosial—termasuk di dalamnya gerakan petani—merupakan gerakan yang dilakukan oleh sekelompok orang secara kolektif, kontinyu dan atau sistematis dengan tujuan untuk mendukung atau menentang keberlakuan tata kehidupan tertentu, dimana mereka memiliki kepentingan di dalamnya, baik secara individu, kelompok, komunitas, atau level yang lebih luas.⁴⁵

1.2. Munculnya Gerakan Perlawanan Petani

Menurut Noer Fauzi, yang mengutip pendapat Paige dengan model analisa kelas Marxis, memperkirakan kemungkinan gerakan petani akan terjadi manakala:⁴⁶

- a. Suatu kelas penguasa tanah berkuasa melulu atas dasar penguasaan tanahnya.
- b. Para petani dihambat kemungkinan mobilitas untuk naik ke atas.
- c. Kondisi kerja dan karakter pekerjaan para petani memungkinkan pembentukan solidaritas.

⁴⁴Wahyudi, *Formasi dan Struktur Gerakan Sosial Petani (Studi Kasus Reklamasi/ Penjarahan atas Tanah PTPN XII (Persero) Kalibakar Malang Selatan*, (Malang: UMM Press, 2005), hlm, 5.

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 6-7.

⁴⁶Noer Fauzi, “Memahami Gerakan-Gerakan Rakyat”, hlm. 24.

Sedang menurut Wahyudi, yang memaparkan pendapat dari Hotman M. Siahaan, bahwa protes petani dapat dilihat dari tiga faktor, yakni antara lain: 1) akibat meluasnya komersialisasi lahan pertanian, 2) berkembangnya sistem nilai baru, dan 3) ambiguitas peran negara dalam membuat pilihan harus reformis atau menindas petani. Sementara itu, Agus Sudibyo mengatakan, bahwa perlawanan petani selalu di dasarkan pada persoalan bahwa negara, aparat keamanan dan pemilik modal telah mengambil alih secara paksa surplus ekonomi dari petani. Mereka bekerja sama dalam aksi penyerobotan tanah petani, dan pendirian perkebunan-perkebunan, serta dalam menghadapi gerakan protes petani.⁴⁷

Senada dengan hal tersebut, Mustain yang mengutip Bates dan Popkin dalam perspektif ekonomi-politik, juga secara jelas menyatakan, bahwa biang keladi atas terjadinya perlawanan para petani tradisional datang dari penetrasi kapitalisme ke kawasan pedesaan yang dalam banyak kasus melahirkan eksploitasi terhadap para petani oleh para tuan tanah, oleh negara, dan kaum kapitalis.⁴⁸

Hal ini dikarenakan, yang oleh Boni Setiawan, dikatakan bahwa dari abad-ke-abad hingga sekarang, penguasaan agraria dikuasai oleh kelas penguasa dan merupakan inti dari sistem ekonomi-sosial-politik-budaya (kapitalistik). Ketika kelas penguasa memakai strategi pasar (neoliberal), maka sumber-sumber alam diletakkan

⁴⁷ Wahyudi, "Formasi dan Struktur Gerakan", hlm. 11.

⁴⁸ Mustain, hlm. 36.

sebagai komoditas bebas di dalam pasar bebas yang dikuasai oleh siapa saja asalkan mampu membelinya. Ada dua tahap penguasaan. *Pertama*, tahap kapitalisme primitif, dimana penguasaan sumber-sumber alam (dan tanah) dilakukan melalui mekanisme ekstra-ekonomi, yaitu kekuasaan politik. Hal ini masih terjadi di Indonesia sampai sekarang, dimana perampasan dan penggusuran tanah dilakukan lewat kekuasaan negara dan militer. Tahap *kedua*, adalah tahap kapitalisme modern (sekaligus kapitalisme global), dimana penguasaan sumber-sumber alam dilakukan melalui kekuatan modal. Sumber-sumber alam ini harus ditaruh dalam pasar komoditas yang bebas diperdagangkan, sehingga siapa saja akan mempunyai akses untuk memperjual-belikannya, termasuk dari pihak asing.⁴⁹

Dengan demikian, jika dilihat dari sudut pandang dialektis, dapat dikatakan bahwa gerakan petani muncul sebagai respon dari kebijakan yang tidak menguntungkan atau memihak kepada petani. Sehingga kemunculannya sebagai gerakan perlawanan, bertujuan untuk mengubah keadaan yang lebih baik bagi petani.

2. Tinjauan tentang Advokasi

2.1. Advokasi dan Jenisnya

Di Indonesia, istilah advokasi seringkali diartikan sebatas kegiatan pembelaan kasus (litigasi). Hal ini dikarenakan pengertian istilah tersebut dipengaruhi oleh padanan kata dari Bahasa Belanda:

⁴⁹Noer Fauzi, “Memahami Gerakan-gerakan Rakyat Dunia Ketiga”, hlm. 155.

advocaat, advocateur (pengacara hukum, pembela/ peguam). Padahal dalam Bahasa Inggris, *to advocate*, tidak hanya berarti membela (*to defend*) tetapi juga memajukan atau mengemukakan (*to promote*) dan menciptakan (*to creat*).⁵⁰ Sehingga, secara sederhana advokasi dapat dipahami sebagai:⁵¹

- 1) Serangkaian tindakan yang diarahkan terhadap para pembuat kebijakan untuk mendukung isu kebijakan tertentu (The POLICY Project, 1995).
- 2) Suatu usaha yang sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan dalam kebijakan publik secara bertahap-maju (*incremental*) (Topatimasang et.al., 2005: vii).

Sementara itu, Edi Suharto yang mengutip Miley dkk, menyatakan bahwa advokasi memiliki dua model yang bisa dijelaskan sebagai berikut:⁵²

- e. Advokasi kasus, adalah kegiatan yang dilakukan seorang Pekerja Sosial untuk membantu klien agar mampu menjangkau sumber atau pelayanan sosial yang telah menjadi haknya. Dikarenakan, terjadi diskriminasi atau ketidak-adilan yang dilakukan oleh lembaga, dunia bisnis maupun kelompok profesional terhadap

⁵⁰Makinuddin dan Tri Hadiyanto Sasongko, “*Analisis Sosia, Beraksi dalam Advokasi Irigasi*, (Bandung: Yayasan AKATIGA, 2006)”, hlm. 13.

⁵¹Sigit Pamungkas dkk, *Advokasi Berbasis Jejaring*, (Yogyakarta: FISIPOL, Universitas Gajah Mada, 2010), hlm. 11.

⁵²Edi Suharto, “*Pekerjaan Sosial di Dunia INdustri, Memperkuat CSR (Corporate Social Responsibility)*”, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 166.

klien. Sementara klien tidak mampu merespon situasi tersebut dengan baik.

- f. Advokasi kelas menunjuk pada kegiatan-kegiatan atas nama kelas atau sekelompok orang untuk menjamin terpenuhinya hak-hak warga dalam menjangkau sumber atau memperoleh kesempatan-kesempatan. Fokus advokasi kelas adalah mempengaruhi atau melakukan perubahan-perubahan hukum dan kebijakan publik pada tingkat lokal maupun nasional. Advokasi kelas melibatkan proses-proses politik yang ditujukan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah yang berkuasa.

Sementara Makinuddin menjelaskan, banyak pihak yang sepakat bahwa advokasi adalah upaya yang ditunjukkan untuk melakukan perubahan sosial (*social transformation*). Dikuatkan oleh Topatimasang yang secara eksplisit menyatakan bahwa advokasi juga bisa diartikan sebagai suatu kegiatan mendesak terjadinya perubahan sosial secara bertahap melalui serangkaian perubahan kebijakan.⁵³ Namun, gerakan sosial yang dimaksudkan disini, peneliti tidak melihatnya sebagai suatu masalah, melainkan sebuah fenomena yang positif atau sebagai sarana konstruktif bagi perubahan sosial.

2.2. Proses Advokasi dan Penyusunan Strategi

Salah satu kerangka analisis yang berguna untuk memahami suatu kebijakan publik, adalah dengan melihat kebijakan tersebut

⁵³*Ibid.*, hlm 31.

sebagai suatu ‘sistem hukum’ (*system of law*) yang terdiri dari isu hukum, tata laksana hukum dan budaya hukum.⁵⁴ Sehingga, kegiatan advokasi juga harus mempertimbangkan dan menempuh proses-proses yang sesuai, karena proses dari ketiganya memiliki tata-caranya sendiri.

Secara garis besar, ketiga jenis proses tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.⁵⁵

- a. Proses-proses legislasi dan yudikatif; proses ini meliputi seluruh proses penyusunan rancangan undang-undang atau peraturan (*legal drafting*) sesuai dengan konstitusi dan sistem ketatanegaraan yang berlaku. Tetapi, pengertian proses legislasi dapat juga berarti prakarsa pengajuan rancangan undang-undang atau bahkan pengujian substansi dan peninjauan ulang undang-undang.
- b. Proses-proses politik dan birokrasi; proses ini meliputi semua tahap formasi dan konsolidasi organisasi pemerintahan sebagai perangkat kelembagaan dan pelaksana kebijakan publik. Tahapan tersebut, sangat diwarnai oleh proses-proses politik dan manajemen hubungan (relasi-relasi) kepentingan-kepentingan diantara berbagai kelompok yang terlibat di dalamnya, mulai dari lobi, mediasi, negosiasi, kolaborasi dan bahkan sampai pada praktek-praktek intrik, sindikasi, konspirasi dan manipulasi.

⁵⁴Roem Topatimasang dkk, “Mengubah Kebijakan Publik”, hlm. 44.

⁵⁵*Ibid.*, hlm. 48-49.

- c. Proses-proses sosialisasi dan mobilisasi; proses ini meliputi semua bentuk kegiatan pembentukan kesadaran dan pendapat umum serta tekanan massa terorganisir yang, akhirnya, akan membentuk suatu pola perilaku tertentu dalam berbagai bentuk tekanan politik (*political pressure*), mulai dari penggalangan pendapat dan dukungan, pengorganisasian, sampai ke tingkat kekuatan (unjuk rasa, boikot, mogok, blokade).

Sementara untuk strateginya, Valerie Miller dan Jane Covey menjelaskan bahwa pengembangan advokasi mencakup beberapa tahap, yang antara lain:⁵⁶

- a. Pembayangan.

Pembayangan yang dimaksudkan adalah kampanye advokasi yang efektif berdasar pada pemahaman yang jelas tentang seperti apa masyarakat yang mereka inginkan atau visi ideal tentang dunia yang diimpikan.

- b. Analisis konteks makro dan seleksi serta analisis masalah.

Analisis konteks makro dilakukan setelah menentukan visi jangka panjang, yakni masyarakat ideal, kelompok-kelompok merasa perlu mendasarkan diri pada konteks sosial dimana kelompok akan beroperasi. Sementara pemilihan dan analisis masalah ditempuh dengan dua langkah, yakni: *Pertama*, melakukan penilaian bersama organisasi dan anggota atau konstituennya untuk mengidentifikasi

⁵⁶Lihat Valerie Miller dan Jane Covey, *Pedoman Advokasi Perencanaan, Tindakan, dan Refleksi*, (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm. 69-112.

dan memprioritaskan masalah-masalah penting. *Kedua*, membuat kerangka kerja analisis masalah untuk memudahkan anggota dalam mendaftar sejumlah masalah besar yang telah diidentifikasi dan diurutkan prioritasnya oleh organisasi dan anggota-anggotanya.

c. Mendefinisikan masalah dan membingkai isu.

Memberikan definisi dan deskripsi yang tersusun dengan baik, dapat membantu kelompok untuk menyatakan kepedulian mereka ke publik secara lebih efektif. Sedang isu-isu dapat dibingkai dalam rangka, a) sasaran-sasaran kebijakan sempit, b) tujuan-tujuan kebijakan menyeluruh yang ditujukan untuk mengubah struktur dan kesadaran masyarakat, dan c) dapat dibingkai dengan cara-cara keduanya.

d. Menentukan tujuan.

Menentukan tujuan yang dimaksudkan adalah menentukan tujuan umum dan sasaran terperinci untuk usaha advokasi seperti dalam hal membingkai isu.

e. Analisis kekuasaan terhadap *stakeholder* advokasi dan sasaran

Dalam menyusun strategi, juga diperlukan proses untuk mengidentifikasi dan menganalisis kekuatan relatif berbagai individu dan kelompok yang prihatin dengan masalah yang diusung dan solusi kebijakan yang terkait yang diusulkan untuk mengatasinya.

f. Penyusunan kegiatan strategis dan taktik.

Untuk mengembangkan strategi yang efektif, diperlukan perancangan kegiatan khusus atau taktik yang akan ditujukan untuk mempengaruhi berbagai target advokasi, yaitu; 1) para pembuat keputusan dan pemegang kekuasaan yang memiliki kemampuan untuk memberi apa yang kita kehendaki, dan 2) orang-orang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi para pembuat keputusan.

g. Pelaksanaan strategi dan taktik

Dalam advokasi berbasis jejaring, sangat dibutuhkan kerja-kerja yang bersifat kolektif. Oleh karena itu konsolidasi aksi kolektif adalah sebuah kebutuhan yang tidak terhindarkan agar kerja-kerja advokasi berjalan secara optimal, tahan lama dan berkesinambungan.⁵⁷

h. Evaluasi dampak

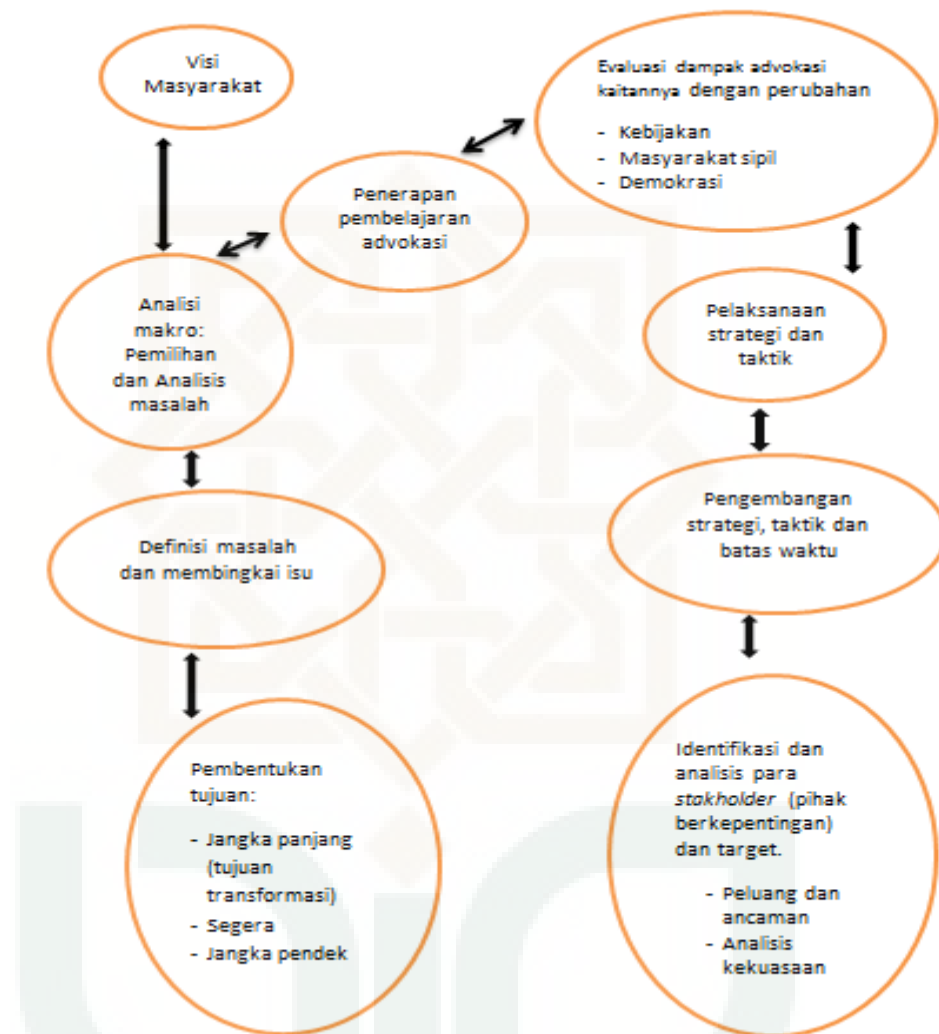
Untuk mengevaluasi usaha advokasi sepenuhnya baik berdasarkan prestasi-prestasi jangka pendek dan jangka panjang, sukses dan dampak perlu diukur dengan perolehan yang dicapai melintasi tiga dimensi yang berbeda, yakni kebijakan, masyarakat sipil dan demokrasi.

i. Penerapan pembelajaran advokasi

Penerapan pembelajaran advokasi dari strategi dan taktik ini, penting untuk usaha advokasi masa depan. Pembelajaran dari hasil

⁵⁷Sigit Pamungkas, “Advokasi Berbasis Jejaring” hlm. 61.

advokasi juga dapat dilakukan untuk tujuan advokasi lain tanpa keterikatan isu dan metode. Lihatlah skema di bawah ini;



Sumber: Miller dan Covey

Bagan I. Proses Advokasi dan Penyusunan Strategi.

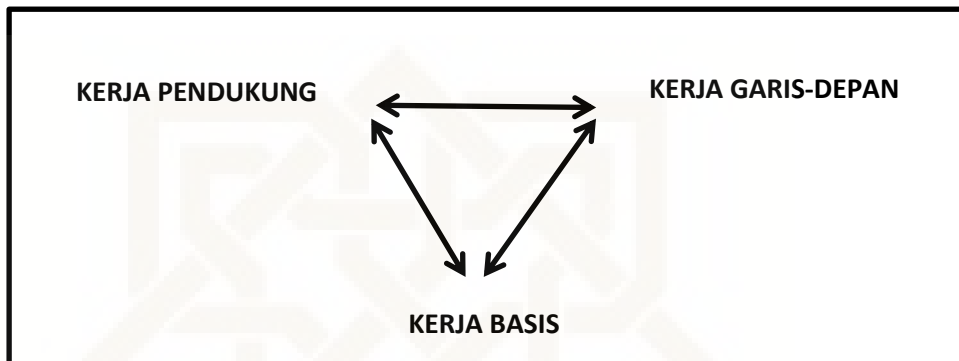
2.3. Pola Kerja Advokasi

Ada tiga pola kerja mendasar yang biasanya selalu muncul dalam proses advokasi. Ketiga pola kerja itu adalah kerja garis depan,

garis pendukung dan kerja basis.⁵⁸ Untuk memahami ketiga pola tersebut, lihatlah Skema di bawah ini.

Bagan II

Tiga Pola Dasar Advokasi



Sumber: Topatimasang, 2007:52.

Perlu diketahui, bahwa masing-masing pola kerja ini menopang pola kerja yang lain, sehingga ketiganya tidak bisa dilakukan secara terpisah atau terlepas satu sama lain.

G. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian tentang strategi PPLP-KP dalam menangani kasus sengketa lahan di pesisir pantai Kulon Progo ini, dilaksanakan disalah satu Dusun yang berada di Kawasan Pesisir Kulon Progo yakni Dusun

⁵⁸*Ibid.*, hlm. 64. Hasrul Hanif dan Rachmad Gustomy menjelaskan bahwa kerja garis depan (*Fron Liner*) adalah para pihak yang memainkan peran sebagai kekuatan garda depan yang memainkan fungsi sebagai juru bicara, perunding, pelobi, terlibat dalam proses legislasi dan yuridikasi, serta menggalang sekutu dalam proses advokasi kebijakan. Kerja pendukung (*Supporting Units*), merupakan para pihak yang memiliki pola kerja seperti ini biasanya lebih banyak berfungsi untuk menyediakan dukungan dana, logistic, informasi, data dan akses dalam proses advokasi kebijakan. Sedang kerja basis (*Grounds Work*), ialah para pihak yang berada dalam pola kerja ini memainkan fungsi sebagai “dapur” gerakan advokasi melalui: membangun basis mass, pendidikan politik kader, membentuk koalisi inti, mobilisasi aksi, dan sebagainya.

Bugel. Dusun Bugel terletak di Desa Bugel, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo. Alasan pemilihan lokasi:

a. Secara Umum

- 1) Dusun Bugel berada di Kawasan Pesisir Kulon Progo
- 2) Penduduk Dusun Bugel I dan Bugel II mayoritas tergabung sebagai anggota PPLP-KP.
- 3) Letak Dusun Bugel yang tidak jauh dari rencana penambangan pasir besi.

b. Secara Khusus

Masyarakat Dusun Bugel mampu mengolah tanah yang awalnya tandus, diubah menjadi tanah yang dapat ditanami dan sekaligus menjadi mata pencaharian sehari-hari. Kini, sektor pertanian tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat petani di pesisir pantai. Akan tetapi, pemerintah bersikap acuh dan berencana untuk menjadikan tanah pertanian tersebut sebagai lahan untuk pertambangan besi. Sehingga, konflik antara warga dengan pemerintah tidak dapat dihindarkan lagi selama delapan tahun belakangan ini. Selain itu, di dusun ini pula cikal-bakal organisasi PPLP terbentuk, yang pada gilirannya nanti organisasi tersebut yang memobilisasi gerakan perlawanan petani terhadap rencana tambang pasir besi.

Selain di Dusun Bugel I dan II, peneliti juga melakukan penelitian di Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta. Penelitian ini

dimulai dari tanggal 3 September sampai pada tanggal 7 November 2015.

2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus (*Case Study*), yaitu sebuah eksplorasi dari “suatu sistem yang terikat” atau “suatu kasus/ beragam kasus” yang dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang mendalam serta melibatkan berbagai sumber informasi yang “kaya” dalam suatu konteks. Sistem terikat ini diikat oleh waktu dan tempat, sedangkan kasus dapat dikaji dari suatu program, peristiwa, aktivitas atau suatu individu.⁵⁹

Menurut Creswell, pendekatan studi kasus lebih disukai untuk penelitian kualitatif. Sehingga, dalam penelitian tentang strategi perlawanan petani ini peneliti juga menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Alasannya adalah *pertama*, pendekatan ini bersifat deskriptif dan lebih menentukan pada proses daripada hasil. Oleh karena itu, peneliti memiliki peluang dalam mengungkap peristiwa-peristiwa sosial yang terjadi di lapangan. *Kedua*, pendekatan ini mampu mengakrabkan hubungan dengan subjek-subjek sasaran penelitian. *Ketiga*, pendekatan ini mampu menetapkan batas penelitian terkait fokus yang dikaji. *Keempat*, pendekatan ini mampu memberika kesempatan untuk menemukan kondisi-kondisi nyata di lapangan sebagai bentuk perkembangan sejarah guna mengembangkan teori yang sudah ada.

⁵⁹John W. Creswell (1998) dalam Yani Kusmarini, “Studi Kasus”, diunduh dari http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._SEJARAH/196601131990012-YANI_KUSMARINI/Laporan_Studi_Kasus.pdf, pada tanggal 23 November 2015.

3. Subyek dan Obyek Peneliti

Subyek penelitian adalah sumber utama dalam penelitian, yaitu yang mempunyai data mengenai variabel-variabel yang diteliti.⁶⁰ Sementara itu, menurut M. Nazir, yang dimaksud dengan subyek penelitian ialah keseluruhan personalitas yang diselidiki atau diteliti.⁶¹ Dengan kata lain, subyek penelitian yaitu sumber data yang peneliti anggap dapat memberikan data-data maupun informasi mengenai kebutuhan penelitian yang di sebut juga dengan informan. Maka dalam penelitian tentang strategi advokasi ini, yang menjadi subyek penelitian antara lain; pengurus PPLP, anggota PPLP, petani pro tambang dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta.

Sedang obyek penelitian adalah permasalahan-permasalahan yang menjadi titik sentral perhatian suatu penelitian.⁶² Dalam penelitian ini, yang menjadi obyek yaitu strategi perlawanan PPLP dalam menggagalkan rencana tambang pasir besi di Kulon Progo Yogyakarta, dengan mempertanyakan metode atau strategi yang digunakan dalam mengadvokasi petani.

4. Teknik Pemilihan Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *purposive sampling* (sampel bertujuan) dengan melakukan seleksi kasus untuk dikaji secara mendalam. Strategi yang digunakan adalah pengambilan sampel bola salju (*snowball sampling*). Alasannya,

⁶⁰Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1900), hal. 34.

⁶¹M. Nazir, *Metode Penelitian*, cet. I (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 66.

⁶²Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 91.

pengambilan sampel bola salju biasanya mampu melacak informasi yang kaya dari informan kunci, guna menambah informasi baru.

Menurut Lincoln dan Guba, sebagaimana yang telah dikutip oleh Moloeng, peneliti memulai dengan asumsi bahwa konteks itu kritis. Oleh karena itu, masing-masing konteks ditangani dari segi konteksnya sendiri. Penelitian kualitatif erat kaitannya dengan faktor-faktor kontekstual. Jadi maksud sampling pada penelitian ini adalah untuk menjaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai sumber dan bangunannya.⁶³

Sehingga, dalam penelitian ini tidak dilakukan pemilihan sampel acak, melainkan sampel bertujuan. Informan dalam penelitian ini antara lain, Pak Sukarman (Sekjen PPLP) dan Pak Manto (Para Legal LBH dan sekaligus anggota PPLP), Pak Mamat dan istrinya, Pak Iwan (advokat LBH yang pernah mendampingi PPLP) dan Mas Satria (anggota LBH), Ibu Surti (warga biasa), serta warga pendatang yang berprofesi sebagai nelayan atau warga netral tambang, peneliti memilih Pak Akrom.

5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini supaya dapat memperoleh data yang relevan dengan permasalahan penelitian, peneliti menggunakan metode observasi, wawancara (*Interview*), dan dokumentasi.

⁶³Lexi J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 223-224.

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan yang cermat dan teliti secara langsung terhadap gejala-gejala yang diselidiki.⁶⁴ Observasi menurut Creswell adalah proses untuk memperoleh data dari tangan pertama dengan mengamati orang dan tempat pada saat dilakukan penelitian.⁶⁵ Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan adalah observasi pasif, yaitu peneliti datang ditempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.⁶⁶

Observasi dalam penelitian ini, dilakukan dengan mengamati secara langsung kepada subyek penelitian dan kondisi lapangan. Peneliti mengamati perilaku petani dalam kegiatan sehari-hari mereka yakni bertani di lahan pasir dan kondisi di lokasi penelitian, kemudian mendokumentasikannya, mencatat hal-hal yang berhubungan dengan perlawanan berupa simbol-simbol atau tulisan perjuangan PPLP. Selain kegiatan sehari-hari petani, peneliti mengamati perilaku petani dalam memberikan informasi atau memberi tanggapan orang asing yang datang ke wilayah mereka. Adapun untuk data yang diperoleh dalam observasi langsung ini, adalah data yang konkrit tentang subjek. Selanjutnya, data diolah dan hasilnya kemudian dibuat dalam bentuk kata-kata atau tulisan.

⁶⁴Nasution, *Metode Researc (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1990), hlm. 34

⁶⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methode)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 197.

⁶⁶Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif*", hlm. 227.

b. Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara adalah pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak dengan cara sistematis dan berlandaskan tujuan penelitian.⁶⁷ Metode wawancara ini digunakan untuk memperoleh keterangan, informasi atau penjelasan seputar permasalahan secara mendalam sehingga diperoleh data yang akurat dan terpercaya. Dikarenakan diperoleh langsung tanpa melalui perantara.

Teknik wawancara dalam penelitian ini adalah teknik wawancara mendalam yang dilengkapi dengan pedoman wawancara terhadap informan yang telah terpilih. Pada awalnya peneliti hanya mewawancarai pengurus gerakan di Desa Bugel (Sekretariat PPLP) yakni Pak Sukarman dan Pak Manto, dan mewawancarai beberapa anggotanya, Pak Mamat dan istrinya. Selain itu, metode ini juga diajukan kepada advokat LBH (Pak Iwan dan Mas Satria), warga biasa yang bersikap netral (Ibu Surti), serta warga pendatang yang berprofesi sebagai nelayan atau warga netral tambang, peneliti memilih Pak Akrom sebagai informan. Wawancara berlangsung, dengan menggunakan pedoman pertanyaan seputar tentang perjuangan atau perlawanan PPLP, wawancara dilakukan secara informal menyesuaikan dengan kondisi dari informan, guna mendapatkan data yang lebih terfokus dengan permasalahan yang sedang diteliti.

⁶⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research, Jilid I*, (Yogyakarta: Andi Offser, 1997), hlm. 47

c. Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data awal yang diperlukan peneliti, yang diperoleh dari dokumen-dokumen tertulis, berupa laporan dan catatan-catatan lainnya. Penelusuran dokumen juga diperoleh dari hasil studi kepustakaan dan dilakukan melalui berbagai media, baik cetak maupun elektronik yang memuat berbagai informasi tentang perjuangan maupun kegiatan dari Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP).

6. Teknik Validitas Data

Cara yang digunakan untuk memperoleh kredibilitas atau derajat kepercayaan data dalam penelitian ini adalah dengan triangulasi informasi, yaitu dengan cara mencari pemusatan informasi yang berhubungan secara langsung pada kondisi data dalam mengembangkan suatu studi kasus. Dikarenakan triangulasi sangat membantu peneliti untuk memeriksa keabsahan data melalui pengecekan dan perbandingan terhadap data.

Penelitian ini memanfaatkan teknik pemeriksaan melalui penggunaan sumber, metode dan teori yang prosesnya antarlain;

- a. Membandingkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
- b. Membandingkan pernyataan orang yang disampaikan di depan umum dengan yang disampaikan secara pribadi.
- c. Membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang tersedia.

d. Membandingkan hasil wawancara dengan teori yang ada.

7. Analisis Data

Bodgan dan Biklen seperti dikutip oleh Moleong menyatakan bahwa analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan untuk mengorganisasi data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, serta menemukan hal penting dan hal yang dipelajari guna memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁶⁸ Basrowi dan Suwandi dengan mengutip Patton juga menyatakan bahwa analisis data adalah proses mengurutkan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola dan satuan uraian.⁶⁹

Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Miles dan Huberman, yang antarlain;

- a. Pengumpulan data, dimana dalam hal ini peneliti mengumpulkan data dengan terjun langsung ke lapangan. Data yang diperoleh didapat dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.
- b. Reduksi data, atau proses analisis untuk mengolah kembali data yang masih kasar yang diperoleh dari lapangan. Data kasar tersebut, kemudian dipilah dan digolongkan antara yang penting dan yang tidak penting. Bagian data yang tidak perlu kemudian dibuang.

⁶⁸Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007). Hlm. 248.

⁶⁹Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 194.

- c. Penyajian data, sebagai bentuk rancangan informasi dari hasil penelitian di lapangan yang tersusun secara terpadu dan mudah dipahami.
- d. Penarikan kesimpulan, dilakukan dengan mengukur alur sebab akibat serta menentukan kategori-kategori hasil penelitian.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan dan pemahaman terhadap skripsi ini, penulis sajikan sistematika pembahasan dalam beberapa bagian. Hal ini dilakukan untuk menghasilkan penulisan dan penyusunan secara sistematis.

Isi skripsi terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. Adapun sistematika bagian awal terdiri dari halaman judul, nota dinas dan pengesahan, halaman motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi dan abstraksi.

Sedang pada bagian utama skripsi terdiri dari:

Bab I, merupakan gambaran umum tentang skripsi secara keseluruhan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, berisi tentang gambaran umum Dusun Bugel dan Paguyuban Petani Lahan Pantai, yang meliputi: profil Desa Bugel, kondisi masyarakat, keadaan sarana dan prasarana, *setting* wilayah, sejarah berdirinya PPLP,

struktur kepengurusan PPLP dan progam-progamnya. Pada Bab ini juga akan diuraikan tentang gambaran umum kasus sengketa lahan pasir besi.

Bab III, berisi tentang hasil penelitian yang telah dilakukan, yaitu mengetahui kemunculan PPLP sebagai gerakan sosial petani dan strategi perlawanan yang dalam hal ini adalah advokasi oleh Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo dalam menolak tambang pasir besi.

Bab IV, adalah Bab terakhir dalam pembahasan penelitian ini, yakni bab penutup yang berisi kesimpulan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran yang dapat membangun bagi Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo dalam perjuangannya menggapai kesetaraan hak sebagai warga negara.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Konflik tambang pasir besi ini pada dasarnya merupakan konflik perebutan sumber daya alam antara pemerintah DIY dengan masyarakat petani Kulon Progo, yang timbul karena adanya hasrat pembangunan yang begitu kuat dengan dukungan investor sebagai stimulusnya. Selain itu, ketidakjelasan status tanah dan klaim sepihak dari Pakualaman membuat masyarakat petani tidak tinggal diam. Mereka memutuskan untuk menolak tambang pasir besi dengan harga mati dan membentuk organisasi yang dinamai Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP).

Strategi perlawanan yang digunakan PPLP dalam perjuangan menolak tambang pasir besi begitu beragam. Segala bentuk strategi perlawanan pernah dilakukan baik dalam ranah hukum, politik maupun aksi langsung. PPLP meluncurkan strategi ini saat ada kesempatan, misalnya di ranah hukum ketika penangkapan Tukijo yang menyalahi prosedur. Sementara aksi langsung yang dilakukan oleh PPLP, berupa demonstrasi ke beberapa tempat seperti DPRD, Kantor Bupati Kulon Progo, Universitas Gadjah Mada, hingga sampai di DPR RI yang berlokasi di Jakarta. Demonstrasi tersebut ditujukan untuk menuntut sikap oligarki dari pemerintah dengan cara memprotes pada setiap kegiatan yang ada kaitannya dengan penambangan pasir besi. Bahkan PPLP juga tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk berkiriman surat kepada Presiden Indonesia, meskipun tidak ada tanggapan hingga sampai hari ini.

Ciri khas dari perlawanan PPLP adalah gerakannya yang beraksi secara reaksioner, sehingga menjadikan pola gerakan PPLP tersebut tidak mudah dibaca oleh pihak lawan. Pengorganisasiannya pun juga unik, dimana organisasi yang bercorak tradisional ini, mampu mengkoordinir dan mengakomodasi anggotanya dengan menekankan sikap egaliter yang diperagakan oleh pengurusnya. Oleh sebab itu, mereka terintegrasi secara masif dalam satu komando dan satu tujuan serta menjadikan sebuah organisasi yang solid. Hal inilah yang membedakan gerakan PPLP dengan gerakan petani yang lain, dimana paguyuban tersebut berasaskan ikatan kekeluargaan sehingga tidak memiliki daftar anggota tetap serta anggotanya tidak hanya bergantung pada arahan atau perintah dari pemimpinnya.

PPLP tidak menjadikan advokasi litigasi sebagai satu-satunya tujuan dari perjuangan, dikarenakan aturan main hukum yang berlaku di negara ini dikhawatirkan malah akan menjadi bumerang bagi perjuangan mereka. Sehingga perjuangan PPLP lebih bertumpu pada bagaimana caranya untuk mengurus dana dari investor maupun pemerintah, dengan aksi-aksi yang mereka lakukan. Selain itu, PPLP juga berkaca pada sejarah perlawanan petani yang biasanya dimotori oleh mereka yang bukan petani. Sebab gerakan semacam itu, dapat dengan mudah dilumpuhkan oleh pihak lawan. Oleh karenanya, PPLP lebih menekankan kepada para petani untuk memperjuangkan nasibnya sendiri daripada diperjuangkan oleh para pejuang petani. Inilah yang menjadi dasar dari pemikiran para petani yang tergabung dalam PPLP. Dengan demikian, meski mereka sedang berada di tengah-

tengah perjuangannya tersebut, para petani pesisir ini tidak lantas melupakan jati dirinya sebagai petani. Tujuannya adalah untuk membuktikan kepada pemerintah dan khalayak bahwa untuk sejahtera itu petani tidak perlu menunggu adanya korporasi tambang pasir besi.

Dalam upayanya untuk membangun organisasi petani yang mandiri, PPLP juga menjalin hubungan dengan organisasi-organisasi lain yang bernasib sama dan tergabung dalam FKMA (Forum Komunikasi Masyarakat Agraris). Selain itu, PPLP juga membangun komunikasi dengan aktivis-aktivis sosial. Hal ini dilakukan karena dalam rangka untuk mempengaruhi kebijakan penambangan ditingkat pemerintahan, PPLP tidak terjun langsung ke politik praktis. Akan tetapi, mereka lebih memilih mencari dukungan dari aktor politik dan organisasi formal. Dukungan dari organisasi lain seperti LSM, aktivis dan akademisi, jelas semuanya mempunyai peran dan kontribusinya masing-masing dalam membingkai isu-isu yang diangkat sebagai tujuan gerakan perlawanan. Hal ini tentu sangat penting dalam proses advokasi kebijakan yang dilakukan oleh PPLP.

Kendala advokasi yang dilakukan oleh PPLP pada dasarnya dikarenakan oleh adanya Kerajaan di Yogyakarta yang diakui dan sangat dihormati sebagai patron oleh mayoritas masyarakat. Hal ini menjadikan gerak advokasi dalam menuntut keadilan menjadi kecil pengaruhnya. Meski sudah mendapat berbagai dukungan internasional terhadap perjuangannya tersebut, namun hal itu belum memberikan pengaruh besar terhadap suara yang diusung oleh gerakan petani atau PPLP sendiri. Akan tetapi, dari semua

upaya perjuangan advokasi PPLP ini, dapat diasumsikan bahwa keberhasilannya diranah kebijakan ialah dapat menahan proses pembangunan tambang pasir besi selama kurang lebih delapan tahun hingga sampai hari ini.

B. Saran

Dengan mengacu pada keberhasilan yang dicapai oleh PPLP, maka yang perlu diperhatikan oleh setiap gerakan petani adalah traumatis bangsa ini terhadap pemberontakan PKI (Partai Komunis Indonesia). Sebab, dampak dari trauma tersebut telah menggeser paradigma sosial di masyarakat. Sehingga persepsi masyarakat yang terbentuk ketika melihat perlawanan petani, hampir selalu dibarengi dengan pengindentikan sebagai jelmaan dari bibit-bibit gerakan PKI. Inilah yang membuat antipati masyarakat terhadap setiap perjuangan petani, dikarenakan PKI yang juga identik dengan kaum petani dan buruh. Oleh karena itu, dalam hal ini yang diperlukan oleh setiap gerakan petani, termasuk PPLP, ialah sebuah kampanye-kampanye yang lebih kreatif guna menarik perhatian dari masyarakat. Sehingga, peluang keberhasilan dari advokasi yang dilakukan akan menjadi semakin lebar.

Penelitian ini pada dasarnya diharapkan untuk dapat menambah khasanah penelitian dan dapat menambah pengetahuan masyarakat terkait strategi perlawanan dan strategi advokasi gerakan petani. Namun, peneliti menyadari adanya keterbatasan dan kekurangan pada penelitian ini, baik dari segi metode penelitian maupun analisis yang dilakukan terhadap fenomena yang terjadi. Oleh karena itu, tentu diperlukan penelitian yang lebih mendalam mengenai senjata gerakan petani difase keempat, yakni advokasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1900.
- Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pelita Harapan, 1994.
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- BSW. Adjikoesoemo, "Pembelaan Tanah Untuk Rakyat Jogja Gate; Penghianatan Terhadap HB. IX dan PA. VII, Yogyakarta: Sami Aji Center, 2012.
- Fakih, Mansour, *Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*, Jakarta: Pustaa Pelajar, 2004.
- Fauzi, Noer, *Memahami Gerakan Rakyat Dunia Ke-Tiga*, Yogyakarta: INSISTPress, 2005.
- Fauzi, Noer, *Petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research, Jilid I*, Yogyakarta: Andi Offser, 1997.
- Hardiyanto, Barid, *Pendidikan Rakyat Petani, Perjuangan Perlawanan Menuntut Hak atas Tanah*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.
- Kartodirdjo, Sartono, *Pemberontakan Petani Banten 1888*, Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1984.
- Limbong, Bernhard, *Konflik Pertanahan*, Jakarta: Margaretha Pustaka, 2012.
- Makinuddin dan Tri Hadiyanto Sasongko, *Analisis Sosia, Beraksi dalam Advokasi Irigasi*, Bandung: Yayasan AKATIGA, 2006.
- Miller, Valerie dan Jane Covey, *Pedoman Advokasi Perencanaan, Tindakan, dan Refleksi*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Moloeng, Lexi J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Muryanti, *Pedesaan dalam Putaran Zaman*, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2011.
- Muryanti dkk, *Teori Konflik dan Konflik Agraria di Pedesaan*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2013.
- Mustain, *PETANI vs NEGARA; Gerakan Sosial Petani Melawan Hegemoni Negara*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007.
- Nasution, *Metode Researc (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 1990.

- Nazir, M., *Metode Penelitian*, cet. I, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Pamungkas, Sigit dkk, *Advokasi Berbasis Jejaring*, Yogyakarta: FISIPOL, Universitas Gajah Mada, 2010.
- Pelzer, Karl J., *Sengketa Agraria: Pengusaha Perkebunan Melawan Petani*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991.
- Putra, Fadillah Dkk, *Gerakan Sosial*, Malang: Averrors Prees, 2006.
- Tarrow, Sidney, *Power in Movement, Social Movement and Contentius Politics*, Cambride: University Prees, 1998.
- Scott, James c., *Moral Ekonomi Petani; Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*, Jakarta: LP3S, 1994.
- Scott, James C., *Senjatanya Orang-Orang yang Kalah*, 2000.
- Sharma Ritu R., *Pengantar Advokasi, Panduan dan Latihan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methode)*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suharto, Edi, *“Pekerjaan Sosial di Dunia INdustri, Memperkuat CSR (Corporate Social Responsibility)”*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Surahmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung : Tarsito, 1990.
- Tim Peneliti SPTN, *Kebijakan, Konflik, dan Perjuangan Agraria Imdomesia Awal Abad 21 (Hasil Penelitian Sistematis STPN, 2012)*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta, 2012.
- Widodo, *Menananm Adalah Melawan*, Yogyakarta: PPLP-KP dan Tanah Air Beta, 2013.
- Wiradadi, Gunawan, *Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir*, Yogyakarta: Insist, 2000.
- Wahyudi, *Formasi dan Struktur Gerakan Sosial Petani (Studi Kasus Reklaming/ Penjarahan atas Tanah PTPN XII (Persero) Kalibakar Malang Selatan*, Malang: UMM Press, 2005

Sumber Tesis dan Skripsi:

- Mardaningrum, Sovya, *Dinamika Gerakan Sosial Petani Pesisir: Studi tentang Dinamika Perlawanan PPLP-KP dalam Merespon Relasi Korporasi Swasta dan Negara dalam Proyek ‘Privatisasi’ Pasir Besi di Kulon Progo*, Skripsi Tidak di Terbitkan, Jurusan Politik dan Pemerintahan, Universitas Gajah Mada Yogyakarta, tahun 2010.

Purwanto, Heri, “Serikat Petani Indonesia Dalam Perjuangan Pembaruan Agraria di Indonesia Periode 1998-2011”, Tesis Tidak Diterbitkan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012.

Sanjaya, Rudi, “Peran Pemerintah Kulon Progo Dalam Mengatasi Konflik Kepentingan Antara PT Jogja Magasa Iron (JMI) Dengan Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP)”, Skripsi, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Styorini, Tatik, “Pemanfaatan Lahan Tidur untuk Peningkatan Usaha Pertanian Masyarakat Di Pesisir Kulon Progo”, Skripsi, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Sumber Makalah:

Darini, Ririn, Makalah, *Sengketa Agraria: Kebijakan dan Perlawanan dari Masa ke Masa*, tt.

Masud, Mustain, “Refleksi Gerakan Rakyat Lereng Gunung Semeru di Era Reformasi 1997”, Ringkasan Desertasi, GERAKAN PETANI DI PEDESAAN JAWA TIMUR PADA ERA REFORMASI: *Studi Kasus Gerakan Reclaiming oleh Petani atas Tanah yang Dikuasai PTPN XII di Kalibakar, Malang Selatan*.

Setyawijaya, Aziz dkk, Makalah, “Gerakan Perlawanan: Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo”, Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada, tt

Sumber Jurnal:

Astuti, Eka Zuni Lusi, “Konflik Pasir Besi: Pro dan Kontra Rencana Tambang Pasir Besi di Kabupaten Kulon Progo”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 16, Nomor 1, 2012.

Badri, dan Mohamad II dkk, “Kontroversi Sertifikasi Tanah “Konflik Tanah Jenggawah” Tahun 1999-2001 (Studi Kasus Konflik Tanah di Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember)”, *Jurnal Ilmu Sejarah*, Volume 1 No. 1, November 2013.

Jati, Wasisto Raharjo, “*Predatory Regime* dalam Ranah Lokal: Konflik Pasir Besi di Kabupaten Kulon Progo”, *Jurnal Demokrasi dan HAM*, Vol. 10, 2013.

Rahmawati, Desi, “Gerakan Petani Dalam Konteks Masyarakat Sipil Indonesia, Studi Kasus Organisasi Petani Serikat Tani Merdeka (SeTAM)”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 6, Nomor 3, Maret 2003.

Sembiring, J., “Konflik Tanah Perkebunan di Indonesia”, *Jurnal Hukum* No. 3 Vol. 16 Juli 2009.

Sumber Internet:

AB. Widyanto, Konflik Mega Proyek Pasir Besi Kulon Progo (Anatomi, Eskalasi dan Resolusi), <http://spotakerblank.blogspot.co.id/2012/06/konflik-mega-proyek-tambang-pasir-besi.html>, diunduh pada tanggal 10 Agustus 2015.

Dokumen Seminar, <http://dokumen.tips/documents/pasir-besi-kulon-progo-dan-sustainable-development.html>, diunduh pada tanggal 23 Oktober 2015.

Gerakan Masyarakat Penerus Amanat Sultan HB IX, “UU KEISTIMEWAAN DIY DAN HAK RAKYAT ATAS TANAH YANG DIJAMIN UUPA”, <http://selamatkanbumi.com/darurat-agraria-yogyakarta-tinjauan-hukum-atas-situasi-terkini/>, diunduh pada tanggal 15 November 2015, pukul 22: 00 WIB.

Hardi Junaedi, “Analisis Kasus Penambangan Pasir Besi di Kawasan Pertanian Lahan Pasir Kulon Progo Ditinjau dari Aspek Ekologi, Etnologi, Ekonomi, dan Teknologi”, Artikel, <http://hardidbullier.blogspot.com/2011/11/analisis-kasus-penambangan-pasir-besi.html>, diunduh pada 16 febuari 2015, pukul 10:48 WIB

<http://m.antaranews.com/berita/252134/menambang-pasir-besi-di-lahan-petani-kulon-progo>, diakses pada tanggal 30 september 2015, pukul 15:00 WIB.

Kompas.com,<http://nasional.kompas.com/read/2008/11/04/15173760/Sesepuh.PPLP.Sesalkan.Kontrak.Penambangan.Pasir.Besi>, diunduh pada tanggal 24 Oktober 2015, pukul 21:32 WIB.

Kompas.com, “Walhi Laporkan Bupati Kulon Progo”, <http://cetak.kompas.com/read/2010/12/28/04011917/walhi.laporkan.bupati.kulon.progo>, diunduh pada tanggal 12 oktober 2015, pukul 13:09 WIB.

Pasir Pantai Kulon Progo: Pertanian vs Tambang, <http://www.anakagronomy.com/2013/03/pasir-pantai-kulon-progo-tambang-vs.html>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2015 pukul 16:08 WIB.

Rahmat Pasha Listyanto, “ANALISIS KASUS PENAMBANGAN PASIR BESI DI KAWASAN PERTANIAN LAHAN PASIR KULON PROGO DITINJAU DARI ASPEK EKOLOGI, ETNOLOGI, EKONOMI, DAN TEKNOLOGI”, <http://hardidbullier.blogspot.co.id/2011/11/analisis-kasus-penambangan-pasir-besi.html>, diakses pada tanggal 1 September 2015, pukul 14:09 WIB.

Saturi, Sapariah, dkk, Hari Tani: Dari Ketimpangan penguasaan Lahan hingga Kemandirian Pangan, Situs Berita dan Informasi Lingkungan, <http://www.mongabay.co.id/2014/09/24/hari-tani-dari-ketimpangan-penguasaan-lahan-hingga-kemandirian-pangan/>, diunduh pada 28 febuari 2015, Pukul 11:42 WIB.

Sejarah Kulon Progo, <https://pusakabudaya.wordpress.com/2009/03/11/cuplikan-sejarah-kulon-progo/>, diakses pada tanggal 30 september 2015, pukul 15:00 WIB.

TribunJogja.com, “Sultan Ground dan Pakualaman Ground Masih Ada”, <http://jogja.tribunnews.com/2015/10/02/sultan-ground-dan-pakualaman-ground-masih-ada>, diunduh pada tanggal 14 oktober 2015, pukul 09:14 WIB.

Website Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kab. Kulon Progo, “Profil Daerah”, <http://bpmpt.kulonprogokab.go.id/pages-39-profil-daerah.html>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2015, pukul 14:02 WIB.

Website Kulon Progo, “Sejarah Berdirinya Kulon Progo”, <http://www.kulonprogo.go.id/>, diakses pada tanggal 30 september 2015, pukul 16:12 WIB.

<http://finance.detil.com/read/2008/11/04/145945/1031064/4/kontrak-karya-tambang-pasir-besi-di-kulonprog-diteken>, diunduh pada 24 September 2015, pukul 21:35 WIB.

<http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/2009/06/09/brk,20090609-180900,id.html>, diunduh pada 25 September 2015, pukul 15:55 WIB.

<http://www.tempointeraktif.com/hg/jogja/2010/12/27/brk,20101227-301838,id.html>, diunduh pada 20 Agustus 2015, pukul 22:32 WIB.

<http://www.krjogja.com/2011/05/lbh-gugat-kapolres-kulonprogo.html>, diunduh pada tanggal 20 Agustus 2015, pukul 22:35 WIB.

<http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2011/06/15/88388/Besok-Sidang-Perdana-Tukijo-Digelar.html>, diunduh pada 19 Oktober 2015, pukul 16:03 WIB.

Sumber Wawancara:

Wawancara dengan Ibu Surti, Dusun Bugel, Kec. Panjatan, Kab. Kulon Progo, Yogyakarta, 22 Oktober 2015.

Wawancara dengan Pak Akrom, Dusun Bugel, Kec. Panjatan, Kab. Kulon Progo, Yogyakarta, 22 Oktober 2015.

Wawancara dengan Pak Manto, Para Legal LBH&Anggota PPLP Dusun Bugel, Kec. Panjatan, Kab. Kulon Progo, Yogyakarta, 22 Oktober 2015.

Wawancara dengan Pak Sukarman, Sekjen PPLP, Dusun Bugel, Kec. Panjatan, Kab. Kulon Progo, Yogyakarta, 26 September 2015.

Hasil wawancara dengan Mas Satria, Advokat Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Yogyakarta, 9 September 2015.

Wawancara dengan Pak Iwan, Advokat Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Yogyakarta, 16 September 2015.

Wawancara dengan Pak A di Dusun Bugel, Kec. Panjatan, Kab. Bugel, Yogyakarta, 26 September 2015.

INTERVIEW GUIDE

A. Interview guide dengan PPLP

1. Bagaimana awalnya isu tambang ini muncul, dan bagaimana sikap PPLP dalam menanggapi hal tersebut?
2. Kenapa PPLP menolak rencana tambang pasir besi yang akan dilakukan oleh pemerintah DIY dan PT JMI?
3. Bagaimana cara PPLP melawan rencana tambang pasir besi tersebut? Upaya apa saja yang pernah ditempuh oleh PPLP? Apakah PPLP mempunyai strategi khusus dalam melawan rencana tambang pasir tersebut?
4. Adakah LSM yang terlibat di dalamnya?
5. Berapa banyak petani yang bergabung dengan PPLP sendiri dan bagaimana cara mengorganisirnya?
6. Bagaimana kondisi sosial masyarakat, setelah dan sesudah isu ini mencuat dan apa saja dampak baik-buruknya bagi PPLP sendiri?

B. Interview guide dengan warga petani

1. Bagaimana kondisi sosial di masyarakat, setelah adanya konflik perebutan lahan antara PPLP dengan Pemerintah DIY ini?
2. Antara bertani sekarang ini dengan bertani sewaktu sepuluh atau dua puluh tahun yang lalu, lebih enak mana? Apakah pertanian hari ini dapat meningkatkan pendapatan petani?
3. Mengapa tidak bergabung dengan PPLP? Seperti apa PPLP dalam pandangan anda?
4. Apa yang akan dilakukan, jika tanah yang sedang digarap sebagai lahan pertanian ini, diambil oleh Pakualaman dan dijadikan sebagai kawasan pertambangan pasir besi?

C. Interview guide dengan LBH

1. Apa pendapat LBH terkait dengan rencana tambang pasir besi di Kulon Progo, Yogyakarta?
2. Sejauh mana keterlibatan LBH dalam konflik pasir besi ini? Upaya apa saja yang telah dilakukan oleh LBH dalam membantu PPLP, terutama di level hukum?

FOTO-FOTO PENELITIAN







SERTIFIKAT-SERTIFIKAT

Nomor: UIN.02/R.Km/PP.00.9/2059/2011



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA**

Sertifikat

diberikan kepada:

Nama : Fuat Hasan
NIM : 11250100
Fakultas/Prodi : Dakwah/ Ilmu Kesejahteraan Sosial
Sebagai : Peserta

atas keberhasilannya menyelesaikan semua tugas workshop

SOSIALISASI PEMBELAJARAN DI PERGURUAN TINGGI

Bagi Mahasiswa Baru UIN Sunan Kalijaga Tahun Akademik 2011/2012

Tanggal 06 s.d. 08 September 2011 (20 jam pelajaran)

KEMENTERIAN Agama RI, Jakarta, 09 September 2011
a.n. Rektor
Ditandatangani oleh: Rektor Bidang Kemahasiswaan

Dr. H. Akhmad Rifa'i, M.Phil.
NIP. 19600905 198603 1006



MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
CENTER FOR LANGUAGE DEVELOPMENT

TEST OF ENGLISH COMPETENCE CERTIFICATE

No: UIN.02/L4/PM.03.2/2.25.12.220/2016

Herewith the undersigned certifies that:

Name : **FUAT HASAN**
Date of Birth : **November 30, 1989**
Sex : **Male**

took TOEC (Test of English Competence) held on **January 06, 2016** by Center for Language Development of State Islamic University Sunan Kalijaga and got the following result:

CONVERTED SCORE	
Listening Comprehension	45
Structure & Written Expression	37
Reading Comprehension	40
Total Score	407

Validity: 2 years since the certificate's issued



Yogyakarta, January 06, 2016
Director,

Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19680915 199803 1 005





PRAKTIK PEKERJAAN SOSIAL
JURUSAN ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax (0274) 552230 Yogyakarta

SERTIFIKAT

NO : UIN.02/IKS/PP.009/432/2015

Diberikan Kepada :

FUAT HASAN

11250100

yang telah menempuh Praktik Pekerjaan Sosial (PPS) I, II, dan III selama 900 jam, dengan keahlian engagement, assesment, perencanaan, intervensi mikro, intervensi mezzo, intervensi makro, dan evaluasi program.

Yogyakarta, 04 Maret 2015
 Ketua Jurusan IKS,



Dr. H. Zainudin, M.Ag
 NIP. 196608271999031001

SERTIFIKAT

No. 118.PAN-OPAK.UNIV.YK.AA.09.2011

diberikan kepada :

atas partisipasinya sebagai :

PESERTA

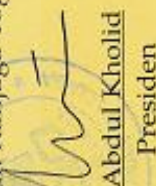
Dalam Orientasi Pengenalan Akademik & Mahasiswa (OPAK) 2011 yang diselenggarakan oleh
Panitia Orientasi Pengenalan Akademik & Mahasiswa (OPAK) 2011 dengan tema :
Menumbuhkan Peran mahasiswa; Upaya Mewujudkan Bhineka Tunggal Ika
pada 14-16 September 2011 di Kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

mengetahui,

Pembantu Rektor III
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


Dr. H. Ahmad Rifai, M.Pd
NIP. 19600905 198603 1 006

Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA)
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


Abdul Kholid
Presiden

Yogyakarta, 16 September 2011

Panitia OPAK 2011
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


M. Fauzi
ketua


Ach. Sulaiman
sekretaris





LABORATORIUM AGAMA
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga

Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta Telp: 0274-515856 Email: fd@uin-suka.ac.id

S E R T I F I K A T

Pengelola Laboratorium Agama Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga dengan ini menyatakan bahwa :

FUAT HASAN

NIM : 11250100

L U L U S

ujian sertifikasi Baca Tulis Al Qur'an yang diselenggarakan oleh Laboratorium Agama
 Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga.

Dekan



Dr. H. Waryono, M.Ag.
 NIP. 19701010 199903 1 002

Yogyakarta, 12 Juni 2013
 Ketua

Dr. Sriharini M.Si.
 NIP. 19710526 199703 2 001

INTEGRATIF-INTERKONEKTIF

DEDIKATIF-INOVATIF

INKLUSIF-CONTINUOUS IMPROVEMENT

UJIAN SERTIFIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

diberikan kepada

Nama : FUAT HASAN
NIM : 11250100
Fakultas : DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jurusan/Prodi : ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
Dengan Nilai :

No.	Materi	Nilai	
		Angka	Huruf
1.	Microsoft Word	90	A
2.	Microsoft Excel	40	E
3.	Microsoft Power Point	95	A
4.	Internet	100	A
5.	Total Nilai	81,25	B
Predikat Kelulusan		Memuaskan	

Yogyakarta, 16 Desember 2015

Kepala PTIPD



Ageng Patwanto, Ph.D.
NIP. 197701032005011003

Standar Nilai

Nilai		Predikat
Angka	Huruf	
86 - 100	A	Sangat Memuaskan
71 - 85	B	Memuaskan
56 - 70	C	Cukup
41 - 55	D	Kurang
0 - 40	E	Sangat Kurang





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SERTIFIKAT

Nomor : UIN.02/L.2/PP.06/P3.922/2014

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memberikan sertifikat kepada :

Nama : Fuat Hasan
Tempat, dan Tanggal Lahir : Temanggung, 30 November 1989
Nomor Induk Mahasiswa : 11250100
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

yang telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Integrasi-Interkoneksi Tematik Posdaya Berbasis Masjid Semester Khusus, Tahun Akademik 2013/2014 (Angkatan ke-83), di :

Lokasi : Girimulya 3
Kecamatan : Panggang
Kabupaten/Kota : Kab. Gunungkidul
Propinsi : D.I. Yogyakarta

dari tanggal 07 Juli 2014 s.d. 17 September 2014 dan dinyatakan LULUS dengan nilai 95,04 (A). Sertifikat ini diberikan sebagai bukti yang bersangkutan telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan status intrakurikuler dan sebagai syarat untuk dapat mengikuti ujian Munaqasyah Skripsi.



Yogyakarta, 03 November 2014

Ketua,

Dr. Zamzam Afandi, M.Ag.
NIP. : 19631111 199403 1 002



شهادة اختبار كفاءة اللغة العربية

الرقم: UIN.02 / L4 / PM.03.2 / a3.25.514 / 2015

تشهد إدارة مركز التنمية اللغوية بأن

الاسم : Fuat Hasan :

تاريخ الميلاد : ٣٠ نوفمبر ١٩٨٩

قد شارك في اختبار كفاءة اللغة العربية في ١٢ نوفمبر ٢٠١٥، وحصل على درجة :

٤٤	فهم المسموع
٤٣	التركيب النحوية و التعبيرات الكتابية
٣٢	فهم المقروء
٣٩٧	مجموع الدرجات

هذه الشهادة صالحة لمدة سنتين من تاريخ الإصدار

جوكجاكرتا، ١٢ نوفمبر ٢٠١٥

المدير



Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.

رقم التوظيف : ١٩٦٨.٩١٥١٩٩٨.٣١٠٠٥





Nomor: UIN.02/R.Km/PP.00.9/2059/2011

**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA**

Sertifikat

diberikan kepada:

Nama : Fuat Hasan
NIM : 11250100
Fakultas/Prodi : Dakwah/ Ilmu Kesejahteraan Sosial
Sebagai : Peserta

atas keberhasilannya menyelesaikan semua tugas workshop
SOSIALISASI PEMBELAJARAN DI PERGURUAN TINGGI
Bagi Mahasiswa Baru UIN Sunan Kalijaga Tahun Akademik 2011/2012
Tanggal 06 s.d. 08 September 2011 (20 jam pelajaran)



Yogyakarta, 09 September 2011

a.n. Rektor

Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan

Dr. H. Akhmad Rifa'i, M.Phil.

NIP. 19600905 198603 1006


KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA

Nomor: UIN.02/R.Km/PP.00.9/2059/2011

Sertifikat

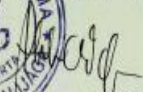
diberikan kepada:

Nama	: Fuat Hasan
NIM	: 11250100
Fakultas/Prodi	: Dakwah/ Ilmu Kesejahteraan Sosial
Sebagai	: Peserta

atas keberhasilannya menyelesaikan semua tugas workshop

SOSIALISASI PEMBELAJARAN DI PERGURUAN TINGGI

Bagi Mahasiswa Baru UIN Sunan Kalijaga Tahun Akademik 2011/2012
Tanggal 06 s.d. 08 September 2011 (20 jam pelajaran)

Yogyakarta, 09 September 2011
 a.n. Rektor
 Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan

 Dr. H. Akhmad Rifa'i, M.Phil.
 NIP. 19600905 198603 1006



FUAT HASAN

Alamat : Dsn. Wanangsri I, Ds. Tening, Kec. Wonoboyo, Kab. Temanggung, RT 02/RW 01.

Alamat Jogja : Jln. Bimokunting No.54 Rt 30 Rw 09, Kel. Demangan, Kec. Gondoksumuan 55221.

Alamat E-mail : fufuathhassan@gmail.com

Telephone : 085702541032



IDENTITAS DIRI

Jenis Kelamin : Laki - laki

Tempat Tanggal Lahir : Temanggung, 30 November 1989

Tinggi Badan : 176 cm

Berat Badan : 65 kg

Status : Belum Kawin

Agama : Islam

RIWAYAT PENDIDIKAN

2011–2016 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial
IPK : 3,56
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

2005-2008 SMA Rifa'iyah Kendal
Jurusan : IPA

2001 - 2004 MTs. Al-Huda, Wonoboyo, Temanggung

1995 – 2001 SDN Tening II, Temanggung

PELATIHAN

Okt 2012 Pelatihan Pendidikan Menghidupkan Nilai (Living Values Education Training) oleh Senat Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta – Sertifikat

Nov 2012 Pelatihan Jurnalistik oleh BOM-F Dakwah LPM RHETOR UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta – Sertifikat

Des 2012 Pelatihan Pendampingan Keluarga dan Anak Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta – Sertifikat

PENGALAMAN ORGANISASI

2012-2016	Anggota Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Rhetor.
2011	Anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial (HIMA-IKS)

PENGALAMAN KERJA

Mei 2009-Feb2011	Bekerja di PT Narumi Indonesia sebagai Operator Produksi.
Nov 2012-Feb 2014	Magang sebagai Pekerja Sosial level mikro, mezzo, makro di Lembaga Sosial Masyarakat Dompot Dhuafa Yogyakarta – Sertifikat.
Okt-Sept 2015	Magang sebagai Pekerja Sosial selama 12 bulan dalam kegiatan asesmen dan pendampingan klien di Panti Sosial Bina Remaja Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta— Sertifikat.

KEMAMPUAN DIRI

Bahasa	Lancar berbahasa Indonesia
Hobi	Membaca, Menulis, Belajar, Sepak Bola
